

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENANGGULANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN
TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Program Studi Ekonomi Pembangunan



Oleh :

Nama : Novia Lestari
NPM : 1505180078
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NOVIA LESTARI
NPM : 1505180078
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NOVIA LESTARI
N.P.M : 1505180078
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN
TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG
PURA KABUPATEN LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NOVIA LESTARI
 N.P.M : 1505180078
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
 PENANGGULANGAN TINGKAT
 KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG
 PURA KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/7-2019	- Konsepsi Kuesioner - Perbaikan bab I, II, dan III		
28/7-2019	- Acc Kuesioner - dan di sebarluaskan.		
17/6-2019	- Olalah data kuesioner.	3	
11/8-2019	- Bab IV - Latar & geografis (gula pasir) - JPS penduduk, luasan, IPM - Deskripsi responden. - Analisis jenis anak.		
18/9-2019	- Pembahasan → semua dgn nuns manajemen didistribusikan		
23/9-2019	- Kesimpulan & saran + Daftar pustaka + perbaikan		
24/9-2019	Acc sidang ufa & hasil.		

Medan, 24 September 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

ROSWITA HAENI, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

*Jembaran Ini Kupersembahkan Khusus Untuk Kedua Orang
tuaku (Ayah dan Ibu Tersayang)*

Untuuk Kalian Berdua (Ayah dan Ibu Tersayang)

*Cintamu, kasihmu, kau berikan padaku
Tulangmu, Keringatmu, kau berikan padaku
Meski Lelah, kau tetap tersenyum
Meski aku sering berbuat salah
Kau tetap memberikan senyum dan cinta
Tak pernah sedikitpun meminta balasan*

*Aku tahu, semua itu agar aku bahagia
Kau adalah cahaya, kau adalah pelita
Kau adalah penuntun jalanku....
Maaf, jika aku belum bisa membalas
Semua pemberianmu untukku*

*Tapi aku janji, Doaku selalu menyeyertaimu
Agar kau bahagia menjalani masa tua
Agar kau selalu tersenyum
Meskipun tak sebesar apa yang kau beri padaku*

*Ibu, kau adalah Bulanku...
Yang selalu dihatiku
Ayah , kau adalah mentariku...
Yang selalu menyinariku*

*Ayah, Ibu, aku mencintai dan menyayangi kalian berdua
Seperti aku mencintai ALLAH SWT..
Semoga ALLAH SWT memberikan kebahagiaan untuk kalian berdua..*

ABSTRAK

NOVIA LESTARI (1505180078), Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. (Skripsi 2019)

Pada tahun 2007, pemerintah kembali membuat suatu program untuk penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu dengan Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut dengan PKH. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunai (*cash transfer*) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima bantuan. PKH bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan serta mendukung dalam upaya mempercepat target *Millenium Development Goals* (MDGs). Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan jumlah penduduk 68.464 jiwa berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Pura. Dan jumlah penduduk Kabupaten Langkat mencapai 1.028.309 jiwa pada tahun 2017 dan 3.247 rumah tangga yang menerima PKH.

Analisis ini menggunakan Deskriptif data Kualitatif dengan jenis data menggunakan survey. Maka diambil sampel sebanyak 44 peserta penerima PKH. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling insidental. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa PKH ditujukan kepada RTSM yang telah ditetapkan oleh BPS dan Kementerian Sosial dapat disimpulkan bahwa hasilnya kurang efektif, dan ada juga yang memberikan pendapatan bahwa ada penerima PKH yang dianggap tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang dapat dilihat dari segi fisik rumah, luas bangunan rumahnya, makanan sehari-hari, jumlah kendaraan yang dimiliki, serta dari pakaian yang dianggap mewah, dan asset tetap lainnya yang menyebabkan tidak efektifnya penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kata kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Tingkat Kemiskinan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tidak lupa Shalawat bernadakan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezekinya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izinnya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai khususnya untuk ayah saya Afrizal dan Ibu saya Nasri Yeni, sebagai sumber motivasi bagi

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk abang saya Riki Hamdani, Rendi Prayuda, Ari Prianto, serta kakak ipar saya Widya Mustika Guci yang selalu memberikan dukungan dan semangat maupun materi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Roswita Hafni, SE. M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arah dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan diakhirat kelak.

9. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik.
10. Keluarga Saya (Seluruh Anggota Keluarga), terima kasih sudah sering membantu penulis dalam segala hal.
11. Kepada Sahabat – sahabat saya, Nurmauliza, Riska Rahmadiyah, Kemala Sari terima kasih telah banyak membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam canda tawa serta duka yang telah banyak kita lewati bersama.
12. Kepada teman-teman seperjuangan saya, Meily Rahmalia, Rahmat Hidayat, Fahmi Irham, Imam Satrio, Salman Paris, Samsuddin harahap yang telah membantu dan dukungan kepada saya.
13. Kepada seluruh teman – teman dari Ekonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu - persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai

kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, September 2019

Penulis

Novia Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTARCK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Rumusan Masalah	16
1.4 Batasan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II Tinjauan pustaka	
2.1 Landasan Teoritis.....	19
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	19
A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik	23
B. Teori Pembangunan Neo Klasik	32
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	37
A Teori Adolf Wagner	39
B. Teori Peacock Wiseman.....	41
C. Musgrave dan Rostow	45
2.1.3 Teori Kemiskinan	45
A. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	48
B. Program Pengentasan Kemiskinan	50
C. Faktor Penyebab Kemiskinan	52
2.1.4 Efektivitas Program Keluarga Harapan	54
A. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan.....	58

2.1.5 Tinjauan Evaluasi Program	60
A Jenis-Jenis Evaluasi Program	61
B. Model Evaluasi Program	63
C. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program	65
2.1.6 Program Keluarga Harapan (PKH)	67
A. Tujuan Program Keluarga Harapan	68
B. Hak dan Kewajiban Peserta PKH	69
C. Besaran Bantuan PKH	71
D. Landasan Program Keluarga Harapan	73
E. Sasaran Penerima Bantuan PKH	74
2.2 Penelitian Terdahulu	75
2.3 Kerangka Konseptual	78
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	79
3.2 Definisi Operasional	79
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	81
3.4 Populasi dan Sampel	82
3.5 Jenis dan Sumber Data	84
3.6 Teknik Pengumpulan Data	85
3.7 Teknik Analisis Data	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Penelitian	87
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat	87
4.1.2 Gambaran Umum Peserta Penerima PKH	89
4.1.3 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Langkat	91
4.1.4 Sejarah Ringkas Kecamatan Tanjung Pura	93
4.1.5 Letak dan Geografis Tanjung Pura	96
4.1.6 Gambaran Umum IPM Kabupaten Langkat	97
4.1.7 Gambaran Umum Pendidikan Kabupaten Langkat.....	98
4.2 Pembahasan	98

4.2.1 Deskriptif Objek Penelitian	98
4.2.2 Pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Pura	98
4.2.3 Kriteria Kemiskinan yang Ditentukan oleh BPS dan Kementerian Sosial Telah Memenuhi Persyaratan Sebagai Penerima PKH di Kecamatan Tanjung Pura	113
4.2.4 Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat	121
4.2.5 Pembahasan dari Semua Jawaban Responden	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	133
5.2 Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kriteria Miskin menurut Dinas Sosial	2
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia	3
Tabel 1.3 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2017	4
Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Langkat	8
Tabel 1.5 Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Tanjung Pura	9
Tabel 1.6 Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017	11
Tabel 1.7 Jumlah Penerima PKH	12
Tabel 2.1 Besaran Bantuan PKH	71
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	75
Tabel 3.1 Definisi Operasional	80
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	81
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan	88
Tabel 4.2 Jumlah Penerima Bantuan PKH	89
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	40
Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman	43
Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat.....	44
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual	78
Gambar 4.1 Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Usia	100
Gambar 4.2 Karakteristik Peserta Berdasarkan Pendidikan	101
Gambar 4.3 Karakteristik Peserta Berdasarkan Pekerjaan	102
Gambar 4.4 Karakteristik Peserta Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	103
Gambar 4.5 Karakteristik Peserta Berdasarkan Jumlah Anak	104
Gambar 4.6 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan/ Bulan	105
Gambar 4.7 Pengetahuan Peserta PKH Mengenai Tujuan PKH	106
Gambar 4.8 Proses Pencairan Dana Bantuan PKH Tepat Waktu	108
Gambar 4.9 Pengetahuan Tentang Hak dan Kewajiban Peserta PKH	109
Gambar 4.10 Berdasarkan Tingkat Kerutinan Mengikuti Pertemuan	110
Gambar 4.11 Berdasarkan Kerutinan Pendamping PKH dalam Melakukan Kegiatan Sosialisasi	111
Gambar 4.12 Berapa Lama Menjadi Anggota Penerima PKH	112
Gambar 4.13 Benar-Benar Ditujukan Kepada RTSM sesuai Kriteria	114
Gambar 4.14 Pengetahuan Responden Terhadap Ada Peserta PKH yang Sebenarnya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Bantuan PKH	115
Gambar 4.15 Berdasarkan Dana Bantuan Yang Diterima Telah Sesuai	117
Gambar 4.16 Kendala Yang Terjadi dalam Proses Pencairan	118
Gambar 4.17 Jenis PKH yang diperoleh	119
Gambar 4.18 Bantuan lain selain PKH	120
Gambar 4.19 PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari	121

Gambar 4.20 Komentar peserta PKH mengenai Bansos PKH	123
Gambar 4.21 Manfaat nyata yang dirasakan sebagai Peserta PKH	
Mendapatkan Bantuan PKH	124
Gambar 4.22 Partisipasi Sosial Terhadap Kesehatan dan Pendidikan Sudah	
Berhasil	125
Gambar 4.23 PKH membantu mengurangi Beban Pengeluaran	126
Gambar 4.24 Dana bantuan benar digunakan untuk Kebutuhan Hidup	
Peserta PKH	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007).

Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Nono Adya Supriatno mengungkapkan, saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah. (www.edukasi.kompas.com).

Permasalahan kemiskinan sangatlah memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (*lost generation*) di masa mendatang. Dalam upaya mengurangi kemiskinan juga perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan 17 UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tabel 1.1

Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² /Orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/Bambu/kayu murahan/semen kualitas rendah
3	Jenis dinding tempat tinggal	Bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plaster
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya/bersama
5	Sumber penerangan utama	Bukan listrik
6	Bahan bakar untuk masak	Kayu bakar/Arang
7	Konsumsi daging/susu/ayam per minggu	Tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu
8	Sumber air minum	Sumur/Mata air tidak terlindungi/sungai/Air hujan
9	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli/Hanya membeli satu stel dalam setahun
10	Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga	Kurang dari 2 kali dalam sehari
11	Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	Petani dengan luas lahan setengah hektare/buruh tani/kuli bangunan/tukang batu/tukang becak/pemulung/pekerja informal lainnya dengan pendapatan Rp.600.000,00 perbulan
12	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Belum pernah sekolah/Hanya sampai jenjang SD dan tidak lebih
13	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp.500.000,-	Tidak ada
14	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak mampu

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).go.id

Selain 14 poin diatas ada satu catatan tambahan: Bila ada anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, Pensiunan PNS/TNI/Polri, maka keluarga tersebut tidak termasuk penerima PKH. (sumber:<http://blogberita.net/2008/06/05/14.syarat-warga-miskin-penerima-pkh>)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun, hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta orang)			Persentase penduduk miskin			Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289 042	253 273
September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308 826	275 779
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881
September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356 378	333 034
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364 527	343 647
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372 114	350 420
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385 621	361 496
September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400 995	370 910

Sumber: BPS Indonesia

Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi

kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera ditentukan dengan kondisi keluarga sebagai berikut :

1. Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana.
2. Keluarga sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yaitu :

1. Faktor internal, yang meliputi : (a) kesakitan (b) kebodohan (c) ketidaktahuan (d) ketidakterampilan (e) ketertinggalan teknologi dan (f) tidak memiliki modal.
2. Faktor eksternal, yang meliputi :
 - a. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan.
 - b. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga.
 - c. Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan.

Tabel 1.3
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Menurut Desa/Kelurahan
Tahun 2017

N O	Desa /Kelurahan	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Serapuh Asli	125	134	69	30	12	370
2.	Pematang Tengah	191	225	249	136	11	812
3.	Paya Perupuk	122	135	219	288	13	777
4.	Pekan Tanjung Pura	745	832	970	594	61	3 202
5.	Lalang	127	211	199	54	3	594
6.	Pantai Cernin	351	276	558	258	20	1 463
7.	Pekubuan	215	310	496	466	22	1 509
8.	Teluk Bakung	203	386	441	26	5	1 061
9.	Pematang Serai	289	192	223	75	7	786
10.	Baja Kuning	134	186	206	87	2	615
11.	Pulau Banyak	172	309	292	71	5	849
12.	Pematang Cengal	377	479	715	435	17	2 023
13.	Kwala Serapuh	136	151	86	71	2	446
14.	Kwala Langkat	72	107	93	61	3	336
15.	Bubun	213	233	258	98	2	804
16.	Tapak Kuda	214	148	179	37	5	583
17.	Karya Maju	275	245	236	171	6	933
18.	Suka Maju	143	242	178	99	6	668
19.	P . Cengal Barat	129	128	179	72	2	510
Jumlah		4 233	4 929	5 846	3 129	204	18 341
Tahun 2016		4 233	4 929	5 846	3 129	204	18 341

Sumber: BPS Langkat

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan,

melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial” (Kementerian Sosial, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan*)

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MGDs).

Ada lima komponen MGDs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan jender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantuan Program, Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TNP2K, 2012),).

PKH merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan beberapa sektor yang dalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen lembaga/istansi terkait yang meliputi: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan lembaga Keuangan perbankan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Peran Pemerintahan Daerah (pemda) dalam memastikan kesediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan PKH ini sesuai komitmen yang sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah (Kemensos RI, 2013:14).

Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Utara mulai diberlakukan pada tahun 2008 yang meliputi 3 Kabupaten/Kota yakni Medan, Nias dan Tapanuli Tengah. Sumatera Utara dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) mengingat jumlah penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2015 sebanyak 1.508.140 jiwa yang tersebar di 33

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Kondisi miskin ini menyebabkan banyak keluarga miskin tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak.

Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, karena dengan kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas dari SDM akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh.

Tujuan PKH dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung (Pedoman Umum PKH : 1-3)

Pendidikan harus diutamakan dan menjadi prioritas yang harus dikedepankan mengingat kedepan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil merupakan salah satu modal utama suatu bangsa untuk dapat bersaing dalam persaingan global yang semakin ketat. Kesulitan mendapatkan akses pendidikan bukanlah satu-satunya masalah yang diakibatkan karena kondisi kemiskinan.

Perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya. Banyak

anak yang putus sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup kedepannya.

Kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Pura, salah satu sebabnya yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia dilatarbelakangi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah.

Dalam buku Pedoman Umum PKH 2008 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Sementara itu secara khusus tujuan PKH adalah (1) meningkatkan konsumsi keluarga penerima PKH, (2) meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH, (3) meningkatkan taraf pendidikan anak peserta PKH, (4) mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial, (5) memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial. (Kemensos)

Tabel 1.4

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Langkat

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2014	100.63	9.99%
2015	114.19	11.30%
2016	115.79	11.36%
2017	114.410	11.15%

Sumber: BPS Kabupaten langkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Langkat jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 sampai 2017 berubah-ubah hingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat tahun 2014 sebanyak 100.630 jiwa dengan persentase 9.99%, dan tahun 2015 sebanyak 114.190 jiwa dengan persentase 11.30%, tahun 2016 sebanyak 115.790 jiwa dengan persentase 11.36% dan pada tahu 2017 sebanyak 114.410 dengan persentase 11.15%.

Tabel 1.5

Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Tanjung Pura

No.	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanjung Pura	15072	16255	16487	16584	16702	17019

Sumber : BPS Langkat

Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak RTSM. Menurut data BPS masih banyak usia sekoah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada diluar sistem persekolahan harus ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar.

Tabel 1.6

Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Serapuh Asli	1253	325
2	Pematang Tengah	3031	767
3	Paya Perupuk	2669	673
4	Pekan Tanjung Pura	12682	3189
5	Lalang	2067	525
6	Pantai Cermin	5837	1453
7	Pekubuan	5135	1286
8	Teluk Bakung	4291	1091
9	Pematang Serai	2571	637
10	Baja Kuning	2201	556
11	Pulau Banyak	2984	748
12	Pematang Cengal	7914	1972
13	Kwala Serapuh	1716	238
14	Kwala Langkat	1524	394
15	Bubun	3110	788
16	Tapak Kuda	2091	540
17	Karya Maju	3184	783
18	Suka Maju	2500	624
19	Pematang Cengal Barat	1704	430
	Jumlah	68464	17019

Sumber : BPS Kabupaten Langkat dalam Angka

Medan Bisnis Langkat, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 34.555 Keluarga Sangat Miskin (KSM) dari 22 Kecamatan di Langkat melalui Kantor Sosial Kabupaten Langkat. Menurut Kepala Kantor Sosial Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung SSTP MAP, menurutnya dari 22 Kecamatan yang ada di Langkat akan menerima dana PKH yang bersumber dari anggaran APBN tersebut.

Tabel 1.7

Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Jumlah KSM
1	Kecamatan Bahorok	1.161
2	Kecamatan Salapian	639
3	Kecamatan Kuala	719
4	Kecamatan Sei Bingai	1.082
5	Kecamatan Binjai	993
6	Kecamatan Selesai	2.122
7	Kecamatan Stabat	2.161
8	Kecamatan Wampu	1.015
9	Kecamatan Secanggang	3.203
10	Kecamatan Tanjung Pura	3.247
11	Kecamatan Hinai	2.142
12	Kecamatan Padang Tualang	1.815
13	Kecamatan Gebang	2.475
14	Kecamatan Babalan	2.454
15	Kecamatan Pangkalan Susu	1.567
16	Kecamatan Besitang	2.107
17	Kecamatan Sei Lapan	1.695
18	Kecamatan Barandan Barat	1.600
19	Kecamatan Batang Serangan	652
20	Kecamatan Sawit Seberang	534
21	Kecamatan Sirapit	565
22	Kecamatan Pematang Jaya	607

Sumber, Dinas Sosial Kabupaten Langkat

PKH di pusatkan Pemerintah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah kesejahteraan dari kelompok yang paling miskin, maka dengan adanya PKH ini diharapkan masyarakat miskin di Kecamatan Tanjung Pura Desa Pekubuan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta mampu menaikkan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi.

Pada kenyataannya banyak masyarakat miskin atau penerima bantuan Dana PKH masih saja ada yang disalah gunakan oleh penerima bantuan untuk kebutuhan yang tidak penting bahkan bisa dikatakan tidak penting sama sekali. Misalnya: walaupun pengambilan dana dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan tertua yang ada dalam keluarga, tidak jarang kepala keluarga laki-laki sering menggunakan dana PKH untuk membeli rokok dan nongkrong diwarung kopi misalnya, yang sudah jelas dapat merusak kesehatannya serta mengurangi jam kerja yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja. Jika uang untuk membeli rokok itu digunakan untuk biaya pendidikan anaknya itu sudah pasti dapat membantu menaikkan taraf kesejahteraan bagi keluarganya dari segi pendidikan. Bayangkan jika harga rokok/bungkus Rp.20.000 dan per hari menghabiskan 1 bungkus rokok maka akan mengeluarkan $Rp.20.000,00 \times 30 \text{ Hari} = Rp.600.000,00$ perbulan hanya untuk membeli rokok. Hal semacam ini yang membuat banyak masyarakat miskin terus menerus tidak bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. (Wawancara Pra Penulisan 18 Desember 2018)

Yang menjadi keunikan dari PKH ini adalah dalam memberikan bantuannya kepada masyarakat, peserta PKH tidak harus melalui sistem administrasi yang panjang, bantuan diterima langsung oleh penerima PKH di

PTPos atau melalui BRI, tidak lagi menggunakan kepanjangan tangan birokrasi pemerintah (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi). Jadi, sangat kecil kemungkinan birokrasi dapat mengkorupsi dana PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Langkat, mengenai pembagian PKH yang tidak tepat sasaran kepada keluarga yang tidak mampu, dan melainkan sasaran nya kepada keluarga yang dinilai mampu. Hal itu langsung di respon beberapa warga di Kabupaten Langkat, mengenai pembagian PKH yang tidak tepat sasaran di Desa Nya.

Dia menambahkan, sejak adanya bantuan keluarga harapan yang disalurkan menteri sosial RI ke pada dinas sosial kabupaten atau kota, dia sama sekali tidak pernah menerima bantuan tersebut. Dan sejak adanya bantuan itu kami juga tidak pernah di beri tahu oleh aparat desa sini dan dinas terkait, kami baru mengetahui nya setelah tetangga kami bercerita tentang adanya PKH. Meski demikian, ada di beberapa desa di kabupaten langkat, pembagian PKH tersebut tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin (Planet.merdeka.com).

Kejadian yang sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan PKH, setiap RTSM pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, walaupun BPS telah memilih berdasarkan 14 Indikator kemiskinan. Namun yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang mampu (kaya) yang menjadi penerima PKH. Berita yang didapatkan adalah pada kelompok RTSM penerima PKH memiliki perbedaan terkait asset atau kondisi rumah tangganya. Misalnya ada diantara mereka yang kepemilikan asetnya tinggi namun ada juga yang sedikit atau ada juga yang kondisi rumahnya baik dengan lantai keramik dan dinding

tembok. Padahal sebenarnya tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang sudah ditetapkan. Bahkan seringkali orang yang mengambil dana PKH menggunakan kendaraan yang bagus dan memakai perhiasan emas. Contoh : Tidak jarang masyarakat penerima PKH dengan kepala keluarga perempuan menggunakan dana yang diberikan untuk membeli baju baru, sepatu baru dll, tentu saja kalau sudah hal semacam itu terjadi, maka dana bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi tidak efektif lagi karena kurang tepat sasaran proses pembagian (antara news).

Jadi, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan di masyarakat Tanjung Pura adalah kurangnya efektivitas pelaksanaan PKH dimana dalam proses memilih masyarakat yang akan diberikan bantuan PKH sering tidak tepat sasaran, di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam program PKH masih banyak masalah dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Tanjung Pura, mengingat program PKH merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta implikasi positif PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggung jawabkan.

Dan berdasarkan dari paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melihat efektifitas pelaksanaan PKH secara langsung di lapangan yang meliputi proses tahapan, permasalahan hingga hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat miskin tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkatnya dalam sebuah

penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerima PKH memiliki Kriteria kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistika dan Dinas Sosial tetapi masih ada penerima PKH yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PKH.
2. Pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) yang terjadi di lapangan belum berjalan secara efektif.
3. PKH dipusatkan pemerintah untuk membantu RTSM dalam memenuhi Kebutuhan Primer atau dasar serta dapat memutus mata rantai kemiskinan.

1.3 Batasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, dan agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak banyak menimbulkan penafsiran, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penerima PKH belum memenuhi kriteria miskin yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistika dan Dinas Sosial.
2. Responden yang diteliti adalah RTSM yang menerima bantuan PKH yang ada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
3. Pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) yang terjadi di lapangan belum berjalan secara efektif.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ?
2. Apakah kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dan Kementerian Sosial telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?
3. Apakah kebijakan program keluarga harapan (PKH) dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
2. Mendeskripsikan kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dan Dinas Sosial telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
3. Mengevaluasi dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

1). Bagi peneliti

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan tentang pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kemiskinan. Serta sumber informasi tambahan dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti kembali mengenai program keluarga harapan.

2). Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang akan diteliti. Dan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

B. Manfaat Non-akademik

1). Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah setempat, dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kabupaten Langkat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten Langkat untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Kkeluarga Harapan terkhusus di bidang pendidikan.

2). Bagi Masyarakat

Supaya bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya dan meringankan beban bagi RTSM dan memahami pentingnya sebuah pendidikan. Dan dana yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai aturan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pembangunan ekonomi mulai didefinisikan ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*) 2) meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai manusia; dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011) .

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

Menurut Adam Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ialah sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jika suatu saat nanti semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh maka

pertumbuhan output pun akan berhenti. Sedangkan sumber daya insani memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output dan stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan (Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan)

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang hanya dibutuhkan adalah modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal

manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri yang merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu aliran ekonomi yang sedang berkembang adalah sistem liberal dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peningkatan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital.

Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini tergantung pada sumber daya alam. Aliran klasik juga mengalami perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik, diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

1. Teori Adam Smith

Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Adam Smith adalah ahli Ekonomi Klasik yang paling terkemuka. Bukunya yang sangat terkenal berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth*

of Nations terbit tahun 1776. Ia meyakini berlakunya "doktrin hukum alam" dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang paling tahu terhadap kepentingannya sendiri sehingga sebaiknya setiap orang dibebaskan untuk mengejar kepentingannya demi keuntungannya sendiri. Ia penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijakan pasar bebas. Pasar persaingan sempurna adalah mekanisme pencipta keseimbangan otomatis yang akan menciptakan maksimisasi kesejahteraan ekonomi. Menurutny terdapat tiga unsur pokok sistem produksi, unsur-unsur tersebut adalah:

1. sumber daya alam yang tersedia
2. jumlah penduduk
3. stok barang modal

Jumlah sumber daya alam merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Maksudnya jika sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output akan berhenti jika semua sumber daya alam telah digunakan secara penuh. Sedangkan sumber daya manusia mempunyai peran yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Besarnya upah cenderung sama dengan kebutuhan hidup minimum. Jika suatu saat tingkat upah diatas tingkat kebutuhan minimum maka tenaga kerja akan meningkat, persaingan dalam mencari kerja akan lebih tajam hal itu mendorong upah turun lagi sampai pada tingkat upah yang sama dengan besarnya tingkat kebutuhan minimum. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya angkatan kerja sedangkan persaingan para kapitalis dalam memperebutkan pekerja akan cenderung meningkatkan upah.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output, sedang jumlah dan pertumbuhan output tergantung pada pertumbuhan stok modal. Pemupukan modal harus dilakukan sebelum pembagian kerja. Pemupukan modal adalah syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. Pemupukan modal dilakukan dengan cara menyetor pendapatan/ menabung. Hampir seluruh tabungan diperoleh dari penanaman modal atau penyewaan tanah sehingga hanya kaum kapitalis dan tuan tanah yang mampu menabung sedangkan kelompok pekerja tidak mampu menabung

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus

pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

2. Teori David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital.

Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang.

3. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicountinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan, 2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2010).

Makna pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut “arus sirkuler” yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut

mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan.(Jhingan, 2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-menerus diruntuhkan dan struktur baru terus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dan gerakan siklis merupakan biaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi , mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2010).

4. Teori Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar

terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para

Pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut (Jhingan, 2010).

Beberapa keterbatasan teori Lewis

1. Tidak semua negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas
2. Tingkat upah di sector kapitalis tidak konstan padahal dalam kenyataannya tingkat upah sector industri di negara terbelakang terus naik

sepanjang waktu walaupun terdapat pengangguran terbuka di sector pedesaan

3. Buruh terampil bukan kesulitan sementara
4. Proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang karena proses pembentukan modal akan berhenti sebelum seluruh surplus buruh terserap.
5. Mengabaikan permintaan total karena anggapannya bahwa sector subsiten konsumsinya sangat sedikit.
6. Mobilitas buruh tidaklah mudah.

5. Teori Hollis B. Chenery

Hollis B. Chenery tentang Analisis teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut,

1. Adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan

menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.

2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.
4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual,

keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional , serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

1. Keynes

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu

meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari

keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Tetapi di tanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes. (Jhingan, M.L, 2010)

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Boediono,1999)

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun

secara administrasi keduanya berbeda. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut:

A. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} \dots \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

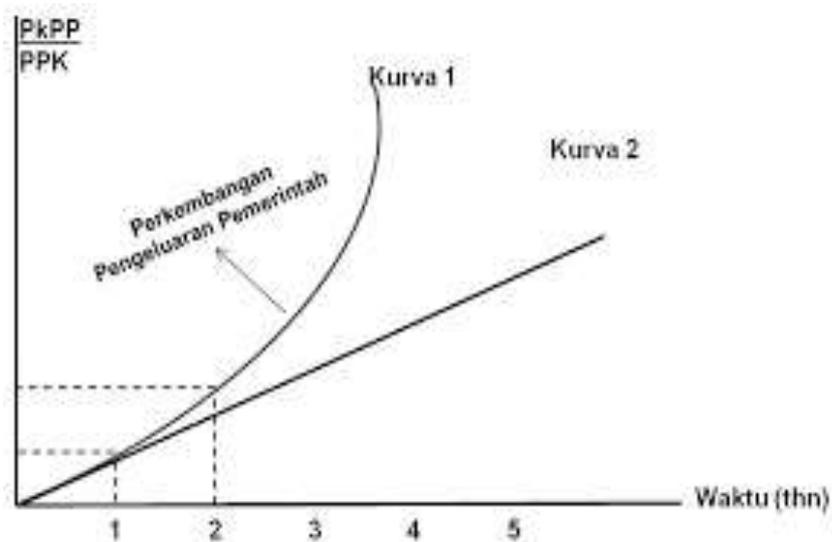
Keterangan :

GpC : Pengeluaran pemerintah Per kapita

YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. (Mangkoesobroto, 1994)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber: Mangkoesobroto, 1993

Menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang

disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut : secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. (Mangkoesoebroto, 1993)

B. Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

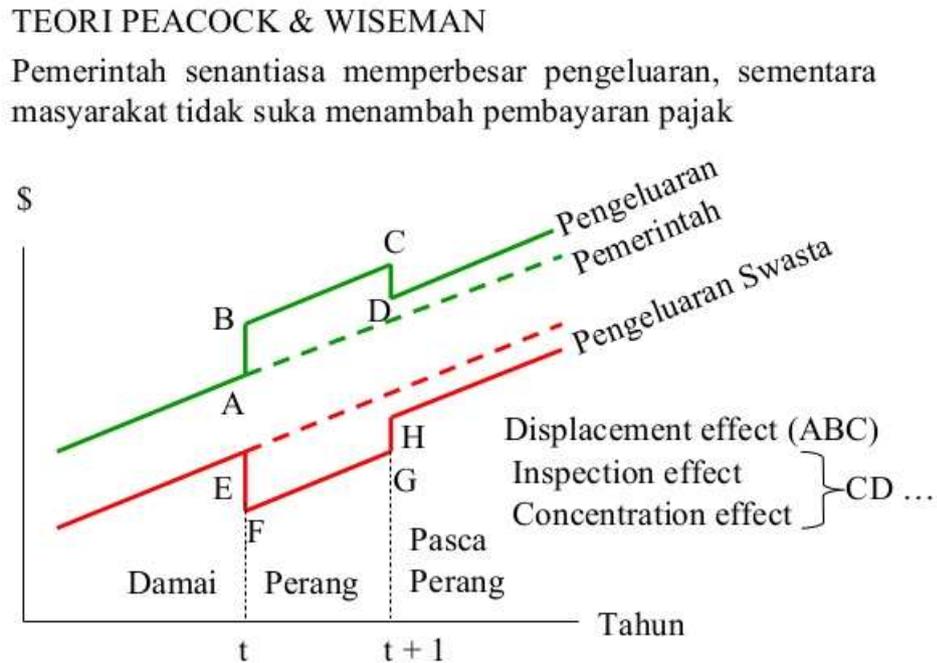
Jadi dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah

berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman

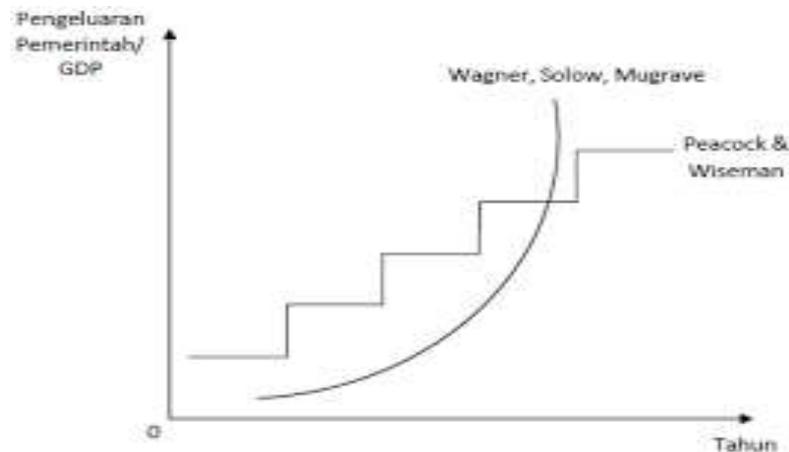


Sumber : Mangkoesubroto,1993

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapatan



Sumber : Mangkoesubroto, 1993

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut

Wagner, Solow, Musgrave Peacock & Wiseman Tahun Pengeluaran Pemerintah/ GDP Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

C. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2.1.3 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan yang tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

1. Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan $>$ Rp. 350.610.
2. Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 280.488- Rp. 350.610.
3. Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 - Rp.280.488.
4. Miskin, pengeluaran per orang per bulan $<$ Rp. 233.740.
5. Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa lebih besar dibanding penduduk kota. jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan

langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis (Adrianus Meliala, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya* (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012),

Dari banyaknya definisi kemiskinan, kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi ketersaingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi, (3) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

A. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosia politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

5. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

6. Kemiskinan Buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun yang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.

B. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Presiden telah mengeluarkan Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut.

1. Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

3. Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah

satunya adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

C. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi.

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan.

Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan

yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (2009:28-29) yaitu :

a. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

b. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

c. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

e. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.1.4 Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Secara umum teori efektivitas merupakan sebuah konsep untuk mengukur produktivitas. Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu. Gibson (2002) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama. Menurut Dunn (2003) efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Pengukuran terhadap konsep efektivitas menurut Makmur (2008) adalah keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni masukan (input), proses (*conversion*), dan keluaran (output).

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu

organisasi. Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
2. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007).

Menurut pendapat Mahmudi efektivitas ialah hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, akan semakin efektif pula suatu organisasi, program atau kegiatan yang telah dirancang. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Komaruddin menambahkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian Hidayat mengatakan bahwa efektivitas ialah sebuah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang

dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. (Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986).

Menurut Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas dapat menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007).

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, ada empat hal yang merupakan unsur-unsur efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Ketepatan waktu, sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang ditentukan.
3. Manfaat, sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

4. Hasil, sesuatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan waktu dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan padanya.

A. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan ini dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

2. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut

dan output yang dihasilkan juga berujung pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Tahap proses (*conversion*) ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya.

A. Ukuran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauhmana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

1. Indikator *masukan*, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
2. Indikator *proses*, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
3. Indikator *keluaran*, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
4. Indikator *manfaat*, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.
5. Indikator *dampak*, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.

2.1.5 Tinjauan Tentang Evaluasi Program

Kata evaluasi bersal dari kata evaluation (bahasa inggris). Kata tersebut diserap kedalam bahasa indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Istilah “penilaian” merupakan kata benda dari “nilai”. Pengertian “pengukuran” mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan ukuran tertentu, sehingga sifatnya

menjadi kuantitatif. Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau menilai.

Menurut Anderson, Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, produser, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, dan Abdul (2010, hal 56), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti dikemukakan oleh Stufflebeam yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, dan Abdul (2010, hal.57), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menuntukan alternatif keputusan.

Menurut Arifin dan Zainal (2010, hal. 45), mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Hal ini sam juga disampaikan oleh Purwanto dan Ngalim (2010, hal. 57).

Evaluasi program juga bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh dari evaluator. Evaluasi program berfungsi untuk menentukan apakah output dan outcomes yang diharapkan dari pelaksanaan program bisa direalisasikan.

A. Jenis-jenis Evaluasi

Wirawan (2012 : 16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus menerus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lam tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat atau pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya”. Istilah lain ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang srdang atau telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.

Evaluasi program , “Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi program (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation)”.

c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai “kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program”.

d. Evaluasi Meterial

Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya “untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu : nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang di pergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut”.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat”.

B. Model Evaluasi Program

Dalam melakukan evaluasi, perlu kiranya dipertimbangkan model evaluasi yang ingin dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang akan di evaluasi.

Ada tujuh model evaluasi yang disajikan oleh Arikunto dalam salah satu bukunya, yaitu :

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. Model ini merupakan yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program ini dimulai.
2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven. Model ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Model ini memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai.
3. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif).

4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan Oleh Stake. Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskriptif dan (2) pertimbangan.
5. CSE – UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan. Model ini mempunyai lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak.
6. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Jadi, jika evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang digunakan maka mau tidak mau harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.
7. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus. Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan adalah mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

C. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Tujuan dari kegiatan evaluasi program adalah yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena seseorang yang ingin mengetahui bagian mana dari komponen

dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya perlu memperjelas dirinya dengan apa tujuan program yang akan dievaluasi.

Menurut Isbandi Rukminto, mengutip pendapat Feurstein sekalipun tidak secara langsung menyebut sebagai tujuan dari pelaksanaan evaluasi, namun dia mengatakan ada sepuluh alasan, mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan, yaitu :

1. Untuk melihat apa yang sudah dicapai
2. Melihat kemajuan dikaitkan dengan tujuan program
3. Agar tercapai manajemen yang lebih baik
4. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat program
5. Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program
6. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup rasional
7. Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik.
8. Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut tidak berhasil dengan baik
9. Agar memberikan dampak yang lebih luas, dan
10. Memberi kesempatan untuk mendapat masukan dari masyarakat

Evaluasi program sangat erat sekali hubungannya dengan kebijakan, karena program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana

dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu :

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit)
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

2.1.6 Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

PKH juga merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan *Millenium*. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan (TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) .

Setiap peserta PKH diberikan kartu peserta PKH sebagai bukti kepesertaan atas nama perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi) yang mengurus RTSM. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas tahun 2009, kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya yang termasuk pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.

A. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anakbalita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM .
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.

B. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini :

1. Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
2. Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
3. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
4. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD. *Ibu Hamil dan Ibu Nifas:*

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapacatatan seperti di bawah ini:

1. Dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka)
3. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
4. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
5. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
6. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

C. Besaran Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Besaran Bantuan PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan Tetap	Rp.500.000
2	Bantuan Ibu Hamil/menyusui	Rp.1.200.000
3	Bantuan anak usia dibawah 6 Tahun	Rp.1200.000
4	Bantuan Peserta Pendidikan Setara SD/Sederajat	Rp.450.000
5	Bantuan Peserta Pendidikan Setara SMP/Sederajat	Rp.750.000
6	Bantuan Peserta Pendidikan Setara SMA/Sederajat	Rp.1.000.000
7	Bantuan Penyandang Disabilitas Berat	Rp.3.100.000
8	Bantuan lanjut usia 70 Tahun keatas	Rp.1.900.000

Sumber: SK Mentri Dinas Sosial RI

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–Juni– September– November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi

dengan Lembaga Pembayaran. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta PKH pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut.
5. Maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
6. Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH(*Ibid.* hlm. 9-10)

D. Landasan Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH dibawah menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Intruksi PResiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- 1) Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil,
- 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

E. Sasaran Penerima Bantuan PKH

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibuhamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk, menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai

Kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009. Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan).

Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel.2.2

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Yohanna Florida Purba (2014)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan DI Kelurahan Titi Kuning	Deskriptif Kualitatif	1.Pemahaman Program Berdasarkan hasil analisis data mengenai pemahaman program dapat diketahui bahwa hasilnya efektif. 2. Ketepatan Sasaran Berdasarkan hasil

		Kecamatan Medan Johor		<p>analisis data mengenai ketepatan sasaran dapat disimpulkan bahwa hasilnya efektif.</p> <p>3. Ketepatan waktu Berdasarkan hasil analisis data mengenai ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak efektif.</p> <p>Tercapainya Tujuan Berdasarkan hasil analisis data mengenai tercapainya tujuan dapat disimpulkan bahwa hasilnya efektif.</p>
2.	Munawwar Sahib (2016)	Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Bajeng kabupaten	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan persentase</p>

		Gowa		38,4%. Adapun 61,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti program pemberian modal usaha pada rakyat kecil, bantuan kesehatan seperti Jamkesmas/BPJS gratis bagi rakyat miskin, bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu dan lain-lain
3.	Kartiawati (2017)	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau dari persepektif	Deskriptif Kualitatif	Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak tepatguna dan tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat

				mengurangi/mengentaskan kemiskinan yang ada di Kampung Bonglai.
--	--	--	--	---

Dari penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda, Begitupula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkajiEfektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentu penelitian ini akan menghasilkan *output* berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan alur berpikir yang logis yang dibuat dalam bentuk gambar dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar sebuah penelitian yang akan dilaksanakan. Kebijakan PKH dianggap sebagai kebijakan paling efektif dalam memutus ranai kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat dalam angka menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan yang menerima bantuan PKH berada di Kecamatan Tanjung Pura.

Masyarakat penerima bantuan dari program keluarga harapan ini adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM).Untuk mempermudah alur pemikiran, penulis membuat bagan yang menggambarkan isi dari pemikiran.Berikut Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini adalah :

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif, dimana hasil akhir dari penelitian ini dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Selanjutnya (Bogdan dan Taylor, 1984: 5) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati”.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Adapun definisi operasional variabel

dalam penelitian ini sebagai berikut: (Husein Umar, “*Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat melalui indikator yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Program Keluarga Harapan (PKH)	Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan tingkat kemiskinan yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat sasaran, PKH hanya diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang datanya bersumber dari desa/kelurahan tersebut. 2. Pemanfaatan tenaga, biaya dan peralatan dengan sebagaimana mestinya, tidak ada penyelewengan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penanggungngan Tingkat Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan sebagai langkah pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. 2. Pekerjaan, Penyediaan lapangan

		kerja baik dari pemerintah maupun swasta merupakan salah satu faktor agar tidak terjadinya pengangguran. 3. Bansos, memperluas bantuan bagi calon penerima yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	--	---

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian, maka akan lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kecamatan Tanjung Pura banyak yang mendapatkan dana Program Keluarga Harapan.

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data, pengajuan judul dan pengesahan judul																				
2	Penulisan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Analisis Data																				
5	Penulisan dan Laporan																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian itu sendiri. Menurut Kuncoro (2001: Bab 3) populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga sangat miskin (RTSM/KSM) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang berjumlah 3.247 rumah tangga.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang digunakan Sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian. Peneliti menggunakan sampel sebagai cara utama guna untuk menaksir perilaku dalam suatu populasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan *Sampling Insidental* yaitu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau insidenta, artinya siapapun orangnya yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan derajat kesalahan atau $\alpha= 15\%$ dengan derajat kepercayaan 85%, artinya peneliti yakin bahwa dalam hal mengestimasi parameter populasi tingkat kebenarannya 85%. Alasan peneliti menggunakan $\alpha=15\%$ karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya lainnya dalam melakukan penelitian.

Maka dalam hal penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = Toleransi Kesalahan (error tolerance) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 15%.

Persentase kelonggaran ketidaktelitian menggunakan 15% karena dari hasil sampel yang didapatkan dianggap sudah mewakili populasi. Maka besarnya sampel adalah:

$$n = \frac{3247}{1 + 3247 \times 15\%^2}$$

$$n = \frac{3247}{74.06}$$

$$n = 43.84 \text{ (44 Responden)}$$

Dari Perhitungan diatas maka didapatkan jumlah sampel yaitu sebanyak 44 responden rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

3.5 Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dari Informasi atau Keterangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data primer di peroleh dari hasil

wawancara langsung kepada responden yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui BPS, catatan-catatan, arsip, jurnal, media cetak, dan dokumen-dokumen lain serta data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tanjung Pura.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, sebagai teknik wawancara yaitu dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat daftar pertanyaan kepada responden yang sudah menjadi anggota sample penelitian.
3. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial yang kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat

dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menyajikan data secara rinci (Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan Praktik , Jakarta: Rineka Cipta 1991).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dengan skalan numerik. Jenis data kualitatif ini adalah data nominal, dimana data tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori, dan juga akan di deskripsikan dalam bentuk persentase dan grafik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3° 14' 00' – 4° 13' 00' Lintang Utara, 97°52' 00' – 98° 45' 00' Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut.

Area Kabupaten Langkat memiliki Batas Wilayah sebagai berikut:

Utara : Selat Malaka

Selatan: Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang

Barat : Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh)

Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

Berdasarkan luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat, Luas daerah terbesar adalah kecamatan bahorok dengan luas 1.101,83 Km², diikuti Kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 Km². Tanjung Pura merupakan Kecamatan dengan luas daerah terbesar keempat dengan luas daerah sebesar 179,61 Km², sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Selama periode tahun 2015-2017, Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Ada 2 Kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak, yaitu Kecamatan Bahorok dan Tanjung Pura. Masing-masing terdiri dari 19 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit ada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Binjai, Sawit Seberang dan Brandan Barat masing-masing terdiri dari 7 desa/kelurahan.

(Sumber : statistik daerah kabupaten langkat 2018)

Tabel 4.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Rasio terhadap Total (%)
1.	Bahorok	1.101,83	17,59
2.	Serapit	98,50	1,57
3.	Salapian	221,73	3,54
4.	Kutambaru	236,84	3,78
5.	Sei. Bingai	333,17	5,32
6.	Kuala	206,23	3,29
7.	Selesai	167,73	2,68
8.	Binjai	42,05	0,67
9.	Stabat	108,85	1,74
10.	Wampu	194,21	3,10
11.	Batang Serangan	899,38	14,36
12.	Sawit Seberang	209,10	3,34
13.	Padang Tualang	221,14	3,53
14.	Hinai	105,26	1,68
15.	Secanggang	231,19	3,69
16.	Tanjung Pura	179,61	2,87

17.	Gebang	178,49	2,85
18.	Babalan	76,41	1,22
19.	Sei. Lapan	280,68	4,48
20.	Brandan Barat	89,80	1,43
21.	Besitang	720,74	11,51
22.	Pangkalan Susu	151,35	2,42
23.	Pangkalan Jaya	209,00	3,34
	Jumlah	6.263,29	100,00

Sumber : www.langkatkab.go.id

Wilayah Kabupaten Langkat meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung seluas ± 266.232 Ha (42,51%) dan kawasan lahan budidaya seluas ± 360.097 (57,49%)
- b. Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas ± 213.985 Ha.
- c. Kawasan Hutan Bakau seluas \pm dan kawasan lainnya ± 14.927 Ha.

(Sumber: BPS Langkat)

4.1.2 Gambaran Umum Peserta Penerima Bantuan PKH Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Tabel 4.2

Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Jumlah KSM
1	Kecamatan Bahorok	1.161
2	Kecamatan Salapian	639
3	Kecamatan Kuala	719

4	Kecamatan Sei Bingai	1.082
5	Kecamatan Binjai	993
6	Kecamatan Selesai	2.122
7	Kecamatan Stabat	2.161
8	Kecamatan Wampu	1.015
9	Kecamatan Secanggang	3.203
10	Kecamatan Tanjung Pura	3.247
11	Kecamatan Hinai	2.142
12	Kecamatan Padang Tualang	1.815
13	Kecamatan Gebang	2.475
14	Kecamatan Babalan	2.454
15	Kecamatan Pangkalan Susu	1.567
16	Kecamatan Besitang	2.107
17	Kecamatan Sei Lapan	1.695
18	Kecamatan Barandan Barat	1.600
19	Kecamatan Batang Serangan	652
20	Kecamatan Sawit Seberang	534
21	Kecamatan Sirapit	565
22	Kecamatan Pematang Jaya	607

Sumber, Dinas Sosial Kabupaten Langkat

4.1.3 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Langkat

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat mencapai 1.028.309 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebanyak 7.101 jiwa. Selama tahun 2016-2017 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat meningkat sebesar 0,70 persen. Dengan kepadatan penduduk sebanyak 164 orang tiap km² tahun 2017. Secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100 yaitu sebesar 101,43.

Jumlah penduduk paling besar adalah kecamatan Stabat. Penduduk asli kabupaten Langkat adalah suku Melayu sedangkan suku pendatang ialah suku Jawa, Karo, Batak (Toba & Simalungun), Mandailing, Minang, Aceh, Tionghoa, Tamil dan lain-lain. Walaupun suku pendatang, suku Jawa merupakan suku mayoritas di Kabupaten Langkat.

Mata pencarian utama penduduk Kabupaten Langkat adalah sebagai petani dan nelayan. Hasil utama pertanian dan perkebunan yang utama di Kabupaten Langkat adalah padi, jagung, kelapa, karet, dan kelapa sawit. (*Sumber: BPS Langkat dalam Angka 2018*)

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2016-2017

Kecamatan	2016			2017		
	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)			Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Bohorok	21065	20974	42039	21214	21114	42328
Sirapit	8453	8332	16785	8515	8385	16900
Salapian	13736	13596	27332	13833	13683	27516
Kutambaru	7183	6962	14145	7232	7006	14238
Sei Bingai	25558	25562	51120	25676	25815	51491
Kuala	20568	20721	41289	20715	20861	41576
Selesai	36845	36369	73214	37108	36623	73731
Binjai	22741	22089	44830	22916	22252	45168
Stabat	42991	43877	86868	43320	44207	87527
Wampu	21700	21116	42816	21851	21255	43106
Batang Serangan	18837	18085	36922	18969	18204	37173
Sawit Seberang	13312	13259	26571	13406	13345	26751
Padang Tualang	24522	24695	49217	24691	24858	49549
Hinai	25376	25038	50414	25549	25202	50751
Secanggih	34695	34212	68907	34935	34441	69376
Tanjung Pura	34294	33696	67990	34537	33927	68464
Gebang	22615	22251	44866	22768	22397	45165
Babalan	30286	29219	59505	30494	29411	59905
Sei Lapan	25137	24230	49367	25312	24392	49704
Brandan Barat	11869	11262	23131	11958	11336	23294
Besitang	23412	22947	46359	23578	23098	46676
Pangkalan Susu	22030	21789	43819	22189	21936	44125
Pematang Jaya	6986	6716	13702	7038	6757	13795
Kabupaten Langkat	514211	506997	1021208	517804	510505	1028309

Sumber : BPS Langkat 2018

Penduduk di Kecamatan Tanjungpura termasuk pada kelas menengah ke bawah karena sebagian besar mata pencarian hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Dalam tabel dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Tanjungpura 67.990 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 68.464. Selama 1 tahun jumlah penduduk Tanjungpura bertambah sebanyak 474 jiwa.

4.1.4 Sejarah Ringkas Kecamatan Tanjung Pura

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Daerah tingkat II Kabupaten Langkat masih berstatus sebagai Asisten Keresidenan dan Kesultanan (raja).

Pada masa itu tercatat ada 3 (tiga) Sultan yang pernah memegang Kekuasaan yaitu :

- Sultan Pertama adalah Sultan Al Haj
- Sultan Kedua adalah Sultan Abdul Aziz
- Sultan Ketiga adalah Sultan Mahmud

Pada sekitar tahun 1947s/d 1949 terjadi Agresi Militer I dan II, Kabupaten Langkat dari segi pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- Pemerintahan Negara Sumatera Timur berkedudukan di Binjai dengan Kepala Pemerintahnya Wan Umaruddin
- Negara Kesatuan RI untuk Langkat berkedudukan di Pangkalan Brandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidullah.

Pada Agresi Belanda I (21 Juli 1947) hampir semua daerah Kabupaten Langkat jatuh ketangan Belanda dan terakhir 4 Agustus 1947 Kota Tanjung Pura diduduki Belanda. Kesatuan untuk daerah Sumatera Timur menetapkan Pejabat Pimpinan Pemerintahan disemua Kabupaten Langkat yang berkedudukan di Binjai dan sebagai Bupatinya H.O.K. Salamuddin, sejak itu pula resmilah Ibukota Kabupaten Langkat di pindahkan dari Pangkalan Brandan ke Kota Binjai.

Dalam perkembangan selanjutnya, keluarlah Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, dengan membawahi 3 (tiga) Wilayah Kewedanaan dengan 15 (lima belas) Kecamatan yaitu :

1. Kewedanaan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai dengan 6 (enam)

Kecamatan :

- Kecamatan Bahorok
- Kecamatan Salapian
- Kecamatan Kuala
- Kecamatan Selesai
- Kecamatan Sei Bingei
- Kecamatan Binjai

2. Kewedanaan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura dengan 5 (lima)

Kecamatan :

- Kecamatan Stabat
- Kecamatan Secanggang
- Kecamatan Hinai
- Kecamatan Padang Tualang
- Kecamatan Tanjung Pura

3. Kewedanaan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan 4

(empat) Kecamatan :

- Kecamatan Gebang
- Kecamatan Besitang
- Kecamatan Pangkalan Susu
- Kecamatan Pangkalan Brandan

Dalam kewedaan secara berjenjang turun, Struktur Pemerintahannya disebut Asisten Wadana dan Kampung (Desa). Pada tanggal 1 Oktober 1964 dilakukan likuedasi/ Penghapusan terhadap Wilayah Kewedanaan dan sejak ini pula Pangkalan Brandan hanya Ibukota Kecamatan Babalan. Sementara itu istilah Asisten Wedana sebutannya menjadi Camat, tugas dan wewenang dan penanggung jawabnya langsung kepada Bupati Langkat.

Dalam perkembangan berikutnya, Daerah Tingkat II Langkat dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati :

1. Wilayah Kerja Pembangunan I Langkat Hulu berkedudukan di Kuala.
2. Wilayah Kerja Pembangunan II Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura.
3. Wilayah Kerja Pembangunan III Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Susu.

Seperti yang telah kami singgung di atas, dengan keluarnya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara, maka sekaligus Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Langkat, saat itu Kecamatan Tanjung Pura mempunyai 16 (enam belas) Desa dan pada Tahun 1980 Desa Pekan Tanjung Pura statusnya berubah menjadi Kelurahan Pekan Tanjung Pura.

Dalam perkembangan berikutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2003, Desa Pantai Cermin dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa dan kemudian perkembangan berdasarkan Perda Kabupaten Langkat Nomor xx Tahun 2006 Desa Pematang Cengal dimekarkan menjadi 2

(dua) desa. Dengan demikian saat ini jumlah desa/kelurahan menjadi 19 (Sembilan belas) desa/kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Pekan Tanjung Pura
2. Desa Serapuh Asli
3. Desa Pematang Tengah
4. Desa Paya Perupuk
5. Desa Pekubuan
6. Desa Teluk Bakung
7. Desa Baja Kuning
8. Desa pematang Sungai
9. Desa Pulau Banyak
10. Desa Lalang
11. Desa Pantai Permin
12. Desa Pematang Cengal
13. Desa Bubun
14. Desa Tapak Kuda
15. Desa Kwala Langkat
16. Desa Kwala Serapuh
17. Desa Karya Maju
18. Desa Suka Maju
19. Desa Pematang Cengal Barat

4.1.5 Letak dan Geografis Tanjung Pura

Tanjung Pura terletak antara Lintang Utara : $03^{\circ} 53' 17''$ - $04^{\circ} 02' 38''$,
Bujur Timur : $98^{\circ} 24' 52''$ - $98^{\circ} 29' 46''$, letak diatas permukaan laut : 4 meter,

Luas Wilayah : 17.961 Ha (179,61 Km²), dan Berbatasan dengan Sebelah Utara : Selat Malaka, Sebelah Selatan : Kec. Hinai dan Kec. Pd Tualang, Sebelah Barat : Kec. Gebang, Sebelah Timur : Selat Malaka dan Kec. Secanggang. Dan jarak Kantor Camat ke Kantor Bupati : 18 Km²

4.1.6. Gambaran Umum Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selama periode tahun 2016-2017, angka IPM Kabupaten Langkat mengalami peningkatan yakni tahun 2016 sebesar 69,13 naik menjadi 69,82 tahun 2017. Angka IPM ini masih berada pada kriteria menengah atas, berarti masih harus lebih ditingkatkan lagi pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan.

Penduduk Miskin Kabupaten Langkat menurun Tahun 2017 persentase Penduduk Miskin Kabupaten Langkat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 11,36 persen tahun 2016 turun menjadi 11,15 persen tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 16 dari 25 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Langkat masih sekitar 11,36 persen tahun 2016, turun menjadi 11,15 persen pada tahun 2017. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2016 tercatat 115.790 jiwa, atau naik dibandingkan penduduk miskin tahun

2017 yang tercatat sebanyak 114.410 jiwa. (*sumber: BPS Langkat dalam Angka 2018*)

4.1.7 Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Langkat

Penduduk rata-rata menyelesaikan pendidikan kelas 3 SLTP Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat terlihat masih rendah yaitu hanya sekitar 8 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Langkat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan kelas 3 SLTP sederajat.

Penduduk laki-laki di Kabupaten Langkat seperti di daerah lain memiliki kemampuan baca tulis lebih tinggi dibanding perempuan. Bila dilihat dari rata-rata lama sekolah, terlihat masih rendah yaitu hanya sekitar 8,51 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Langkat hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan sampai kelas 3 SLTP sederajat. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Langkat untuk tahun ajaran 2017/2018 seorang guru rata-rata mengajar 16 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan beban guru untuk mengajar semakin tinggi, dimana untuk jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 16 murid dan di jenjang SLTA beban seorang guru hanya mengajar 18 murid. (*sumber: BPS langkat dalam Angka 2018 dan Dinas Pendidikan Kab. Langkat*)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskriptif Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada 44 peserta BPJS Kesehatan di Kecamatan Tanjung Pura. Daftar Pertanyaan yang disusun langsung kepada peserta melalui kuesioner wawancara.

1. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Jenis Kelamin

Program Keluarga Harapan ini khususnya diprioritaskan bagi ibu-ibu yang tengah hamil, ibu yang memiliki balita, dan ibu-ibu yang memiliki anak usiasekolah yang tercakup ke dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Kenapaharus ibu-ibu, Ini karena ibu-ibu ataupun wanita baik nenek/kakak dianggap lebih ahli mengelola keuangan keluarga dengan baik, tidak seperti pihak laki-laki yang kemungkinan tidak akan memanfaatkan dana untuk pendidikan maupun kesehatan malah untuk membeli hal-hal lain yang kurang perlu. Oleh sebab itu yang menjadi penanggung jawab dana tersebut adalah ibu, nenek, kakak perempuan/pengasuh wanita.

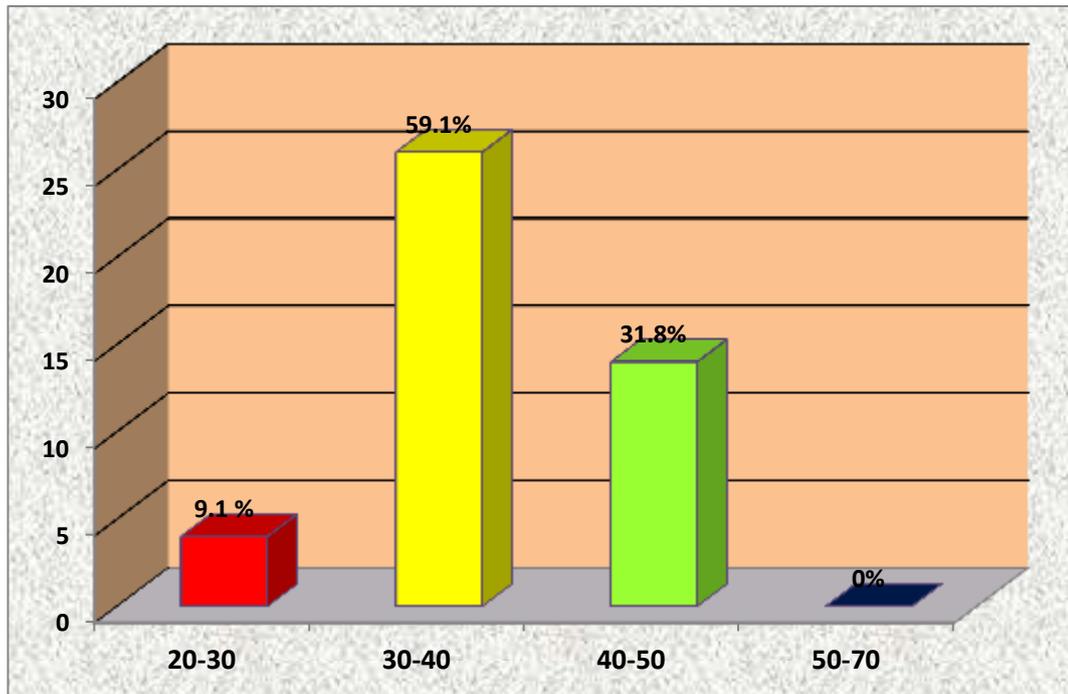
Dari hasil yang diperoleh bahwa yang paling dominan jumlah peserta PKH di Kecamatan Tanjungpura adalah Perempuan dengan jumlah persentase 100 % (44 peserta).

2. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Usia

Berdasarkan data yang diperoleh pada 44 responden peserta PKH di Kecamatan Tanjungpura. Usia Peserta yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Karakteristik Peserta Berdasarkan Usia



Sumber :Diolah Oleh Penulis

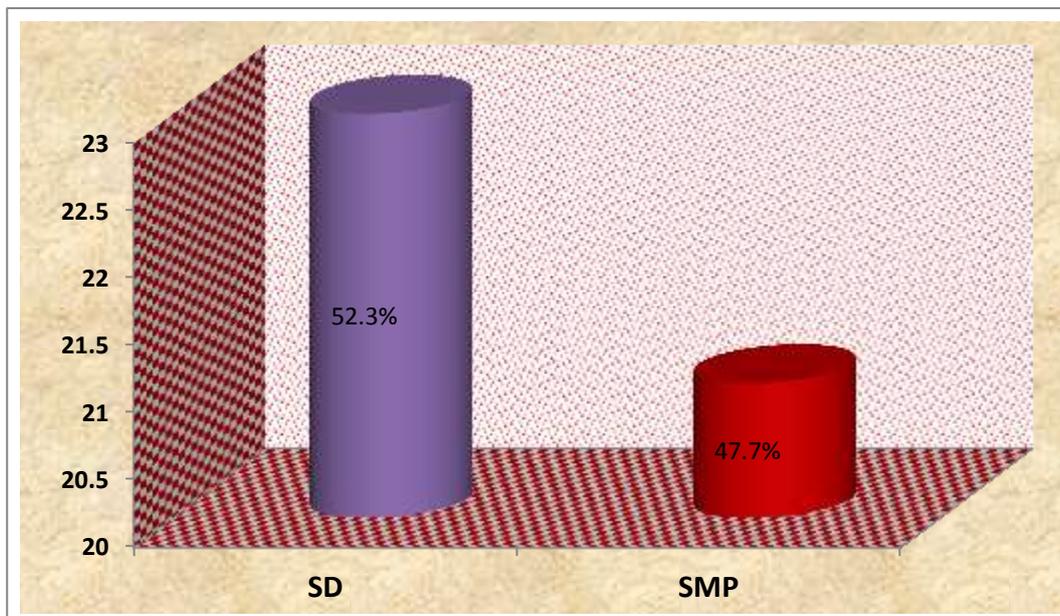
Dilihat dari usia peserta PKH usia 20-30 tahun paling dominan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 4 peserta (9.1%), selanjutnya pada tingkat peserta PKH tertinggi pada usia 30-40 tahun sebanyak 26 peserta (59.1%), selanjutnya pada usia 40-50 tahun sebanyak 14 Peserta (31.8%) kemudian pada usia 50-70 tidak ada yang menerima bantuan PKH.

3. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan terakhir peserta merupakan bagian dari penentuan sampel penelitian. Hal ini ditunjukkan melalui tabel dan gambar distribusi sampel peserta berikut ini.

Gambar 4.2

Karakteristik Peserta Berdasarkan Pendidikan



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahuibahwa peserta program keluarga harapan yang menyelesaikan pendidikan SD ada 23 orang (52.3%) hal ini dikarenakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu dan pada umumnya masyarakat dahulu belum menganggap bahwa pendidikan untuk perempuan itu penting. Yang selalu diutamakan untuk melanjutkan sekolah tinggi-tinggi adalah anak laki-laki saja karena anak laki-laki lah yang akan menjadi penerus keluarga.

Responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 21 orang (47.7%), Keseluruhannya ini terjadi karena pada waktu yang lalu pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat kurang belum lagi keadaan ekonomi mereka yang serba kesusahan memposisikan mereka sebagai orang yang tidak memiliki pilihan untuk bersekolah atau melanjutkan

pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi. Padazaman dahulu juga belum ada program pemerintah yang memberikan pendidikangratis sampai ke tingkat SMP dan ditambah lagi kurangnya sarana dan prasaranapendidikan di daerah asal (kampung halaman) mereka.

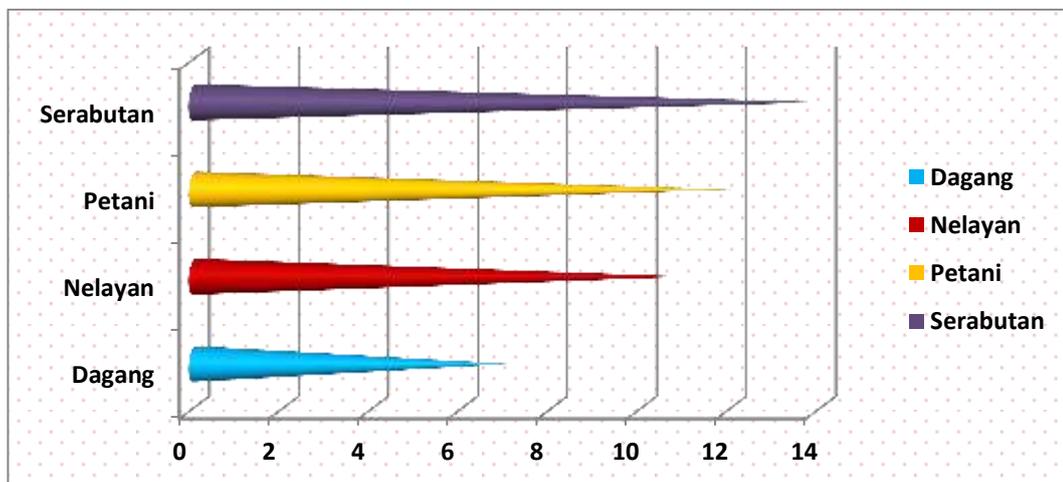
Rata-rata masyarakat penerima PKH di Kecamatan Tanjung Pura ini tingkat pendidikannya masih rendah. Para pendamping PKH inilah yang memberikan mereka arahan agar tetap memberikan semangat dan arahan kepada para ibu-ibu agar anak-anak mereka tidak mengalami hal yang sama. Dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan kedepannya.

4. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Pekerjaan Suami

Pekerjaan Suami merupakan bagian dari penentuan sampel penelitian. Hal ini ditunjukkan melalui tabel dan gambar distribusi sampel peserta berikut ini:

Gambar 4.3

Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan Suami



Sumber :Diolah Oleh Penulis

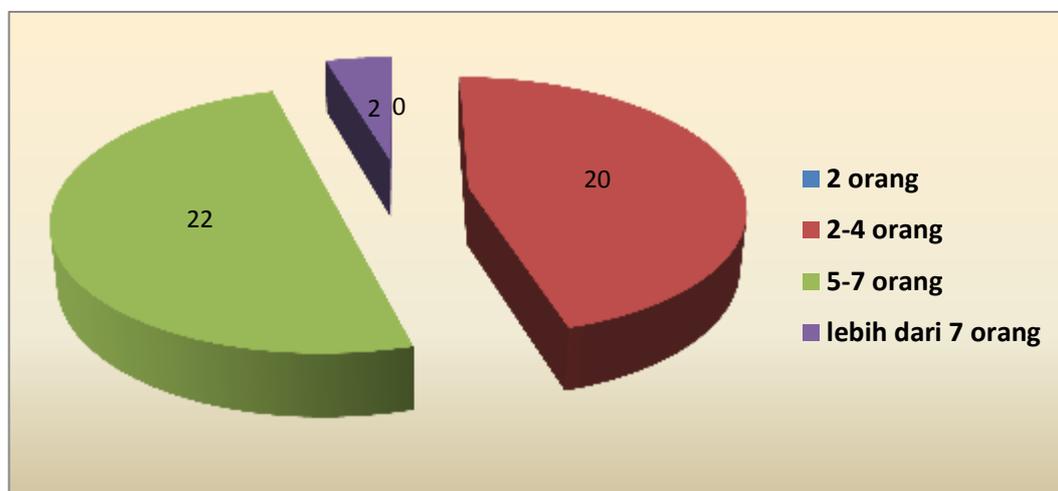
Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa mata pencaharian yang paling dominan yang ada di Kecamatan Tanjung Pura adalah Serabutan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, dimana terdapat 14 peserta (31.8%) yang kepala rumah tangga mereka yang memiliki pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, kemudian yang kedua sebagai Petani yang terdiri dari 12 peserta (27.3%), ketiga sebagai Nelayan terdiri dari 11 peserta (25.0%) dan yang paling rendah yaitu berdagang yang terdiri dari 7 peserta (15.9%).

Hal ini juga merupakan refleksi dari tingkat pendidikan mereka yang tidak jauh beda dari tingkat pendidikan pasangan mereka. Tingkat pendidikan mereka yang rendah mengakibatkan mereka kesulitan mencari pekerjaan yang baik sehingga pendapatan mereka pun rendah pula.

5. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Gambar 4.4

Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga



Sumber :Diolah Oleh Penulis

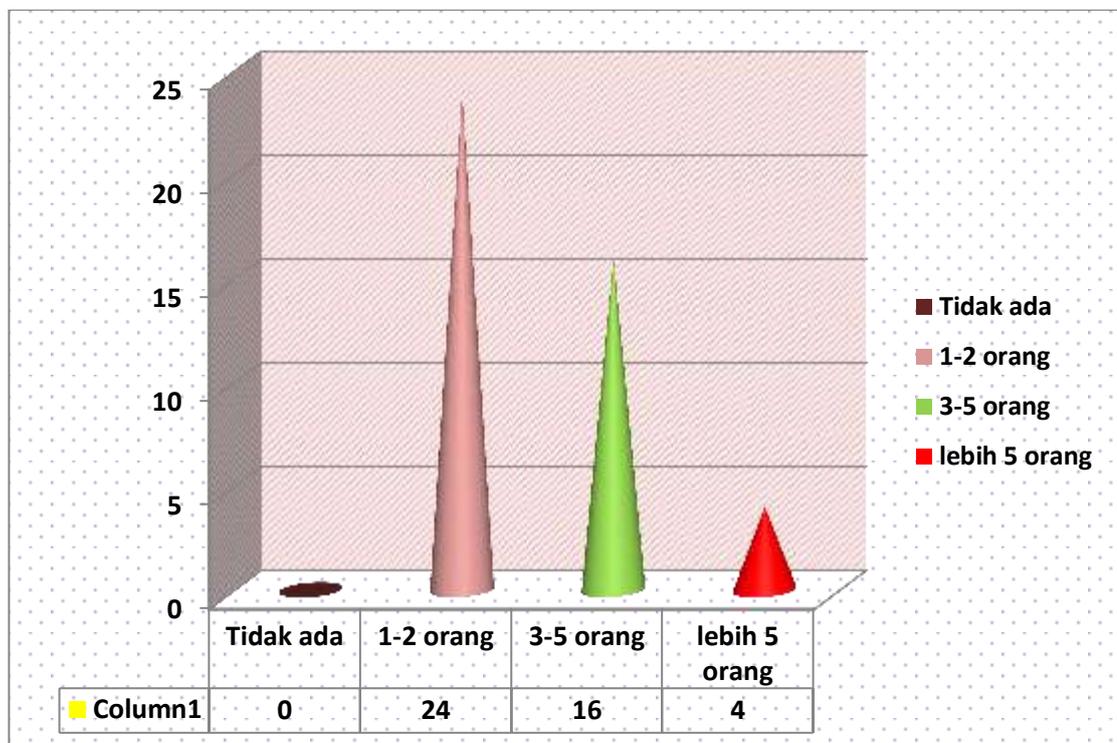
Jumlah anggota keluarga yang ada dalam setiap rumah tangga dimana dalam 1 keluarga terdiri dari lebih dari 7 orang ada sebanyak 2 peserta PKH (4.5%) sedangkan 5-7 orang terdiri dari 22 Peserta (50.0%) dan 2-4 orang dalam satu keluarga terdiri dari 20 peserta (45.5%) dari setiap jumlah anggota keluarga.

6. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Jumlah Anak dalam Keluarga

Jumah anak yang dimiliki dalam satu keluarga menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan sosial PKH yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.5

Berdasarkan Jumlah Anak



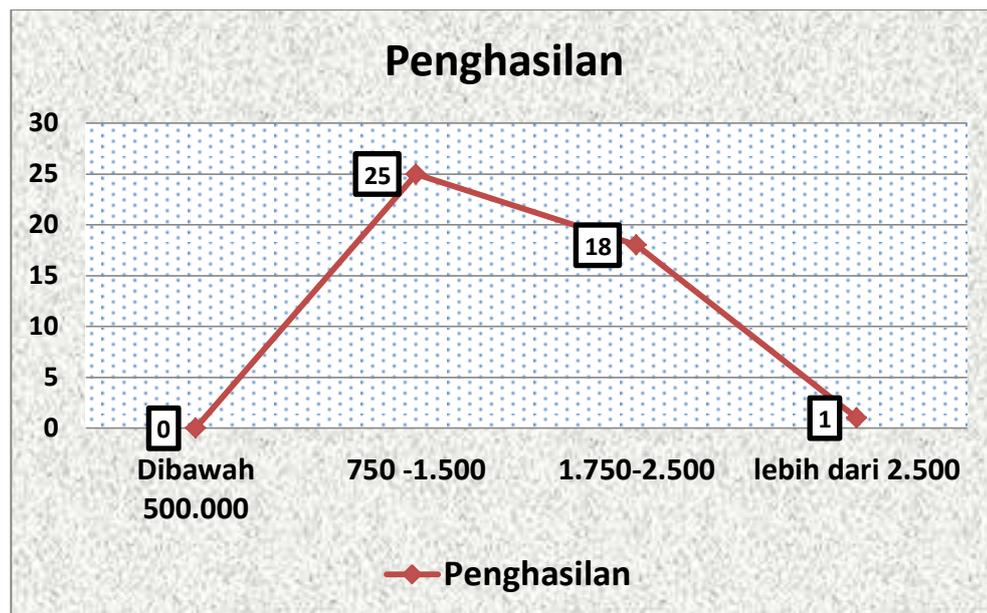
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Dari gambar diatas dapat ditarik penjelasan bahwa jumlah anak peserta PKH yang paling banyak terdiri dari 1-2 orang ada sebanyak 24 peserta PKH (54.5%) dan dilanjutkan dengan 3-5 orang anak ada sebanyak 16 Peserta (36.4%) dan jumlah penerima PKH yang paling sediiit adalah lebih dari 5 orang anak ada 4 peserta PKH (9.1%). Rata-rata masyarakat penerima PKH yang menjadi sampel di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat memiliki anak/tanggungan 1-3 orang. Yang memiliki anak sekolah serta anak balita dan ibu hamil yang menyusui.

7. Karakteristik Peserta PKH Berdasarkan Penghasilan/Bulan

Gambar 4.6

Karakteristik Berdasarkan Penghasilan/Bulan



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan pada diagram dapat kita ketahui bahwa peserta program keluarga harapan yang memiliki penghasilan 750-

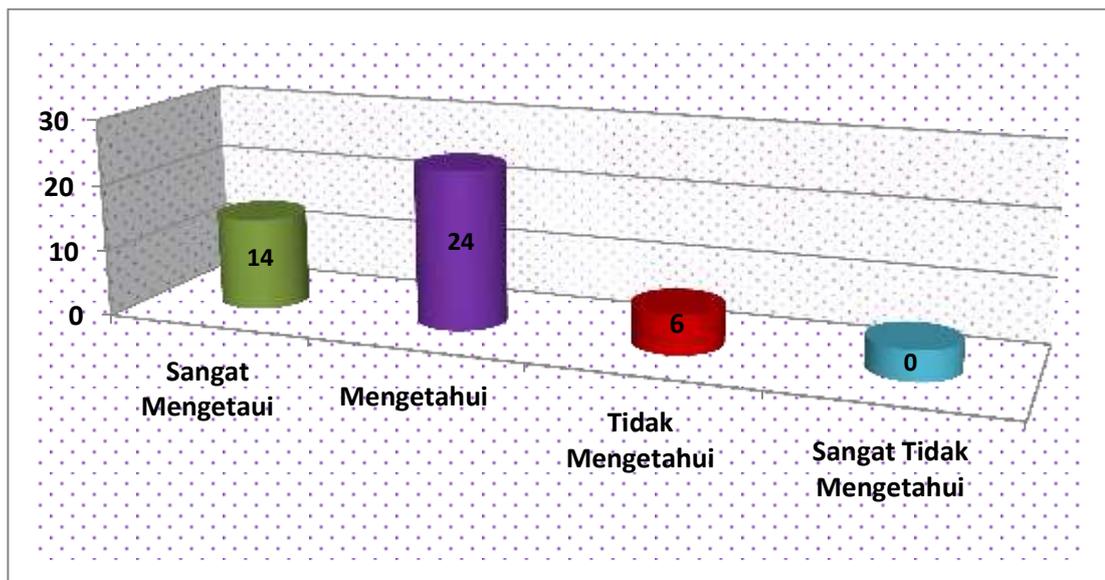
1.500/bulan sebanyak 25 peserta PKH, dan yang memiliki penghasilan 1.750-2.500 sebanyak 18 peserta PKH dan dilanjutkan dengan peserta yang memiliki penghasilan diatas 2.500.000 ada 1 orang peserta. Dan dari Penghasilan Suami/Perbulan, sudah termasuk penghasilan Istri untuk membantu suami mencari uang yang bekerja sebagai tukang cuci, tukang gosok dan sebagainya. Sehingga mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

4.2.2 Deskriptif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

1. Persepsi Peserta PKH Tentang mengetahui tujuan dari PKH

Gambar 4.7

Mengetahui Tujuan PKH

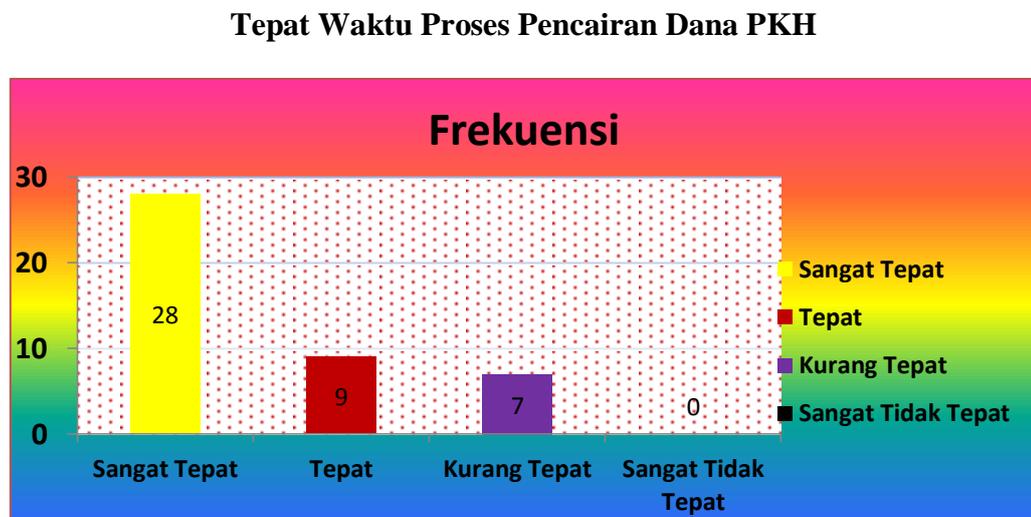


Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat mengetahui mengenai tujuan dari program keluarga harapan, yakni sebanyak 14 peserta (31.9%) dan terdapat 24 Peserta PKH (54.5%) mengetahui , dan 6 Peserta (13.6%) yang menyatakan tidak mengetahui tujuan dari Program Keluarga Harapan. Tujuan dari program ini. Menurut responden yang mengerti, tujuan program ini adalah untuk membantu mereka dalam membiayai pendidikan anak dan kesehatan keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dimasa yang akan datang. Sedangkan responden yang tidak mengetahui tujuan dari program ini beralasan bahwa mereka tidak ingat lagi dikarenakan waktu pengenalan program sudah sangat lama berlalu. Hal lain yang membuat mereka kurang mengerti adalah kurangnya aktifnya mereka dalam mengikuti pertemuan kelompok. Untuk lebih jelasnya, tujuan PKH adalah untuk meningkatkan status kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan) mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga sangat miskin.

2. Berdasarkan Proses Pencairan Dana BantuanPKH Tepat Waktu

Gambar 4.8



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Hasil penelitian dilapangan menyimpulkan bahwa ada 28 (63,6%) peserta PKH yang menyatakan tepat proses pencairan dana PKH tersebut, dan yang menyatakan Tepat ada 9 Peserta PKH (20.5%) , sedangkan yang menyatakan kurang tepat ada 7 orang peserta PKH (15.9%) , dan tidak ada yang menyatakan proses pencairan dana bantuan PKH sangat tidak tepat (0 %). Pencairandana bantuan dilakukan tidak tepat waktu. Mereka kurang mengetahui apa yang menjadi alasan dari keterlambatan itu. Namun berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pendamping PKH, keterlambatan itu bukanlah hal yang disengaja.

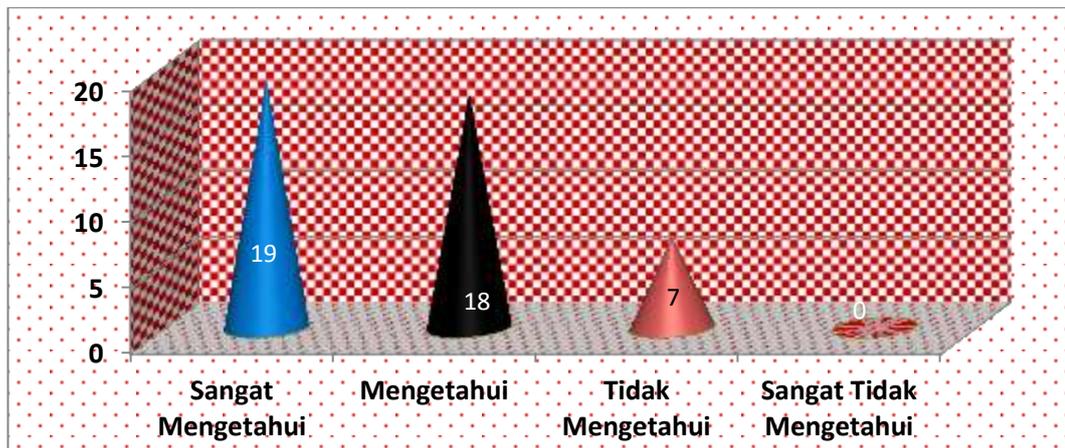
Ketidaktepatan waktu pencairan dana PKH berasal dari pusat sehinggaberimbab ke daerah-daerah. Namun walaupun bantuannya terlambat, tetapi selisih waktunya hanya sedikit, misalnya terlambat beberapa hari saja.

Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan.

3. Berdasarkan Pengetahuan Peserta PKH terhadap Hak dan Kewajiban sebagai Peserta PKH

Gambar 4.9

Pengetahuan Peserta PKH terhadap Hak dan Kewajiban sebagai Peserta



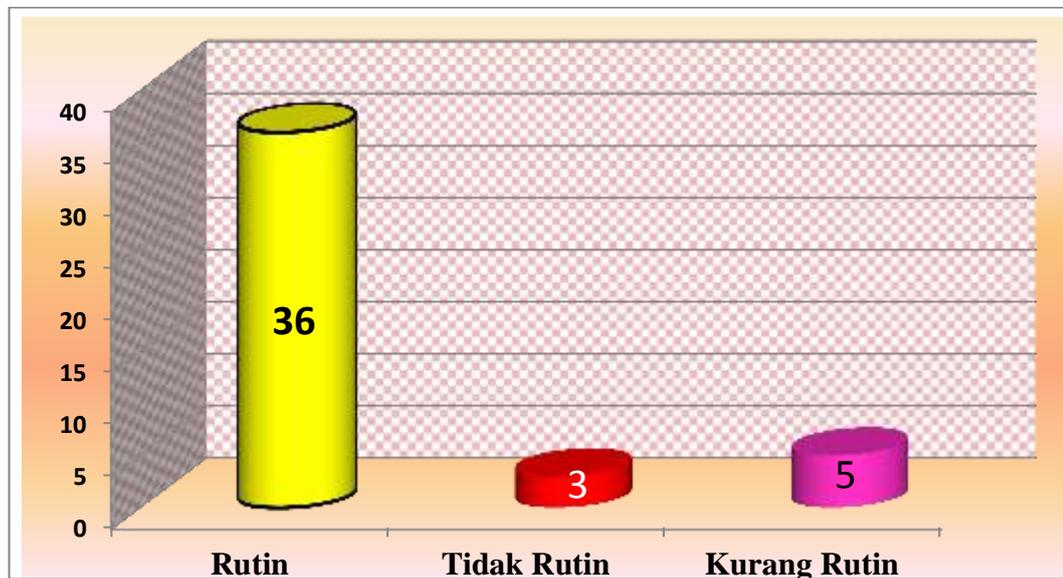
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang disajikan pada diagram 4.9 dapat kita ketahui bahwa sebanyak 19 orang (43.2%) mengaku sangat mengetahui hak dan kewajiban bagi peserta PKH, dan menyatakan mengetahui terdapat 18 orang peserta PKH (40.9%) selanjutnya yang menyatakan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari peserta PKH adalah 7 orang (15.9%), sedangkan tidak ada yang menyatakan sangat tidak mengetahui Hak dan Kewajiban Sebagai Peserta PKH di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Karena diantara semua peserta ada yang tidak sering mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan pendamping. Sehingga mereka kurang mengetahui hak dan kewajiban dari peserta PKH.

4. Deskripsi Berdasarkan Tingkat Kerutinan Mengikuti Pertemuan Kelompok

Gambar 4.10

Berdasarkan Tingkat Kerutinan Mengikuti Pertemuan Kelompok



Sumber :Diolah Oleh Penulis

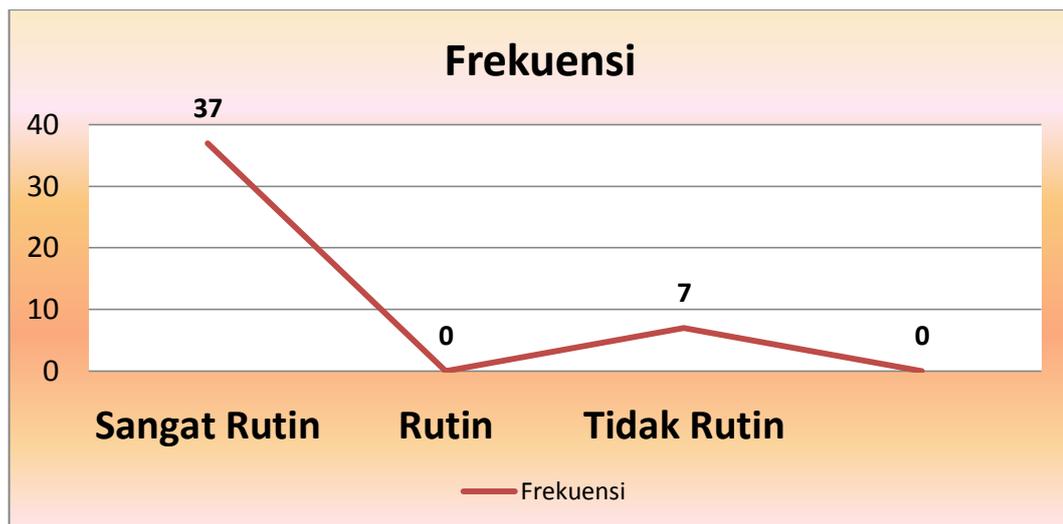
Berdasarkan data yang disajikan pada diagram 4.10 dapat kita ketahuibahwa sebanyak 36 orang peserta PKH (81.8%) mengaku selalu rutin dalam mengikuti pertemuan kelompok. Mereka menyadari bahwa mengikuti pertemuan kelompok merupakan salah satu dari beberapa kewajiban mereka yang harus dipenuhi. Mereka sadar bahwa pertemuan kelompok adalah hal yang penting yang harus dilakukan guna membahas mengenai bantuan PKH, juga dalam setiap pertemuan kelompok para pendamping akan kembali mengingatkan mereka mengenai tujuan dasar PKH yang juga merupakan tujuan dasar mereka pula. Untuk itu mereka mengaku berusaha untuk selalu hadir dalam setiap pertemuan.

Sebanyak 3 orang (6.8%%) mengatakan bahwa mereka tidak rutin mengikuti pertemuan kelompok, alasannya karena waktu yang sering bertabrakan dengan jadwal kegiatan mereka. Waktu bekerja yang tidak tetap membuat mereka kewalahan dalam membagi waktu. Sehingga mereka tidak bisa selalu dapat menghadiri pertemuan kelompok. Dan ada juga yang menyatakan ada kurang rutin mengikuti rapat/musyawarah yang dilaksanakan Pendamping PKH sebanyak 5 orang Peserta PKH (11.4%).

5. Deskriptif Berdasarkan Kerutinan Pendamping PKH dalam Melakukan kegiatan sosialisasi

Gambar 4.11

Kerutinan Pendamping Dalam Melakukan Sosialisasi



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang disajikan pada diagram 4.11 dapat kita ketahuibahwa sebanyak 37 orang peserta PKH (84.1%) mengaku Pendamping selalu rutin dalam melakukan sosialisasi. Dan ada juga 7 Peserta PKH (15.9%)

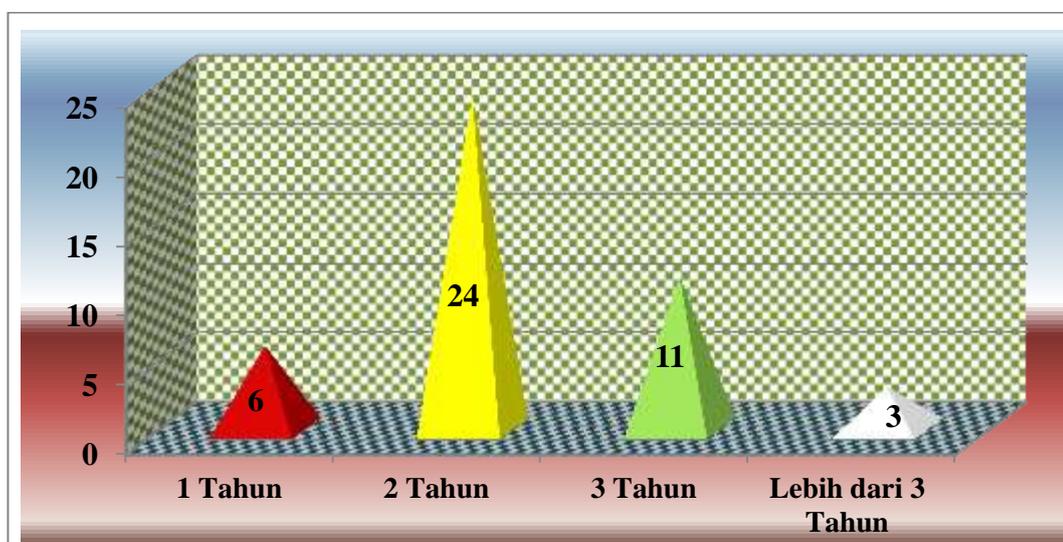
menyatakan bahwa Pendamping Kurang rutin melakukan sosialisasi ke daerah mereka. Maka dari itu mereka menyatakan Pendamping kurang aktif dalam melakukan sosialisasi kepada Ibu-ibu penerima bantuan PKH yang ada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

6. Deskriptif Peserta PKH Pertama kali memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga harapan

Dari hasil penelitian masyarakat yang menjadi peserta PKH di Kecamatan Tanjung Pura menyatakan bahwa mereka yang mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah, mereka mendapatkan Informasi adanya PKH berasal dari Pejabat desa/Kecamatan setempat. Dimana nama mereka terdaftar dari Pusat yaitu Kementerian Sosial/ Dinas Sosial lalu diturunkan kepada Pejabat Desa. Dari Pejabat Desa tersebut lalu di informasikan kepada masyarakat.

7. Sudah berapa lama Ibu mendapatkan Bansos PKH tersebut?

Gambar 4.12



Sumber :Diolah Oleh Penulis

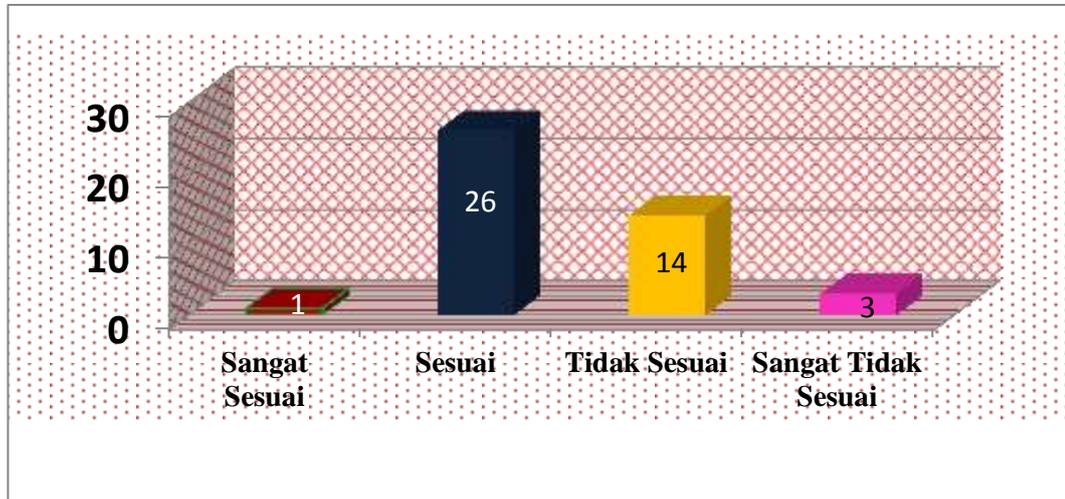
Berdasarkan hasil penelitian langsung dilapangan bahwa terdapat jawaban Peserta yang berbeda-beda diantaranya dari 44 Peserta PKH yang menyatakan bahwa dia memperoleh bantuan PKH berjalan 1 Tahun terdapat 6 orang (13.6%) sedangkan yang menyatakan bahwa dia mendapatkan selama 2 Tahun ada 24 Orang (54.5%), ada juga yang menyatakan selama 3 Tahun ada 11 orang (25.0%), sedangkan yang paling rendah atau sedikit yaitu Lebih dari 3 tahun ada 3 Orang (6.8%). Jadi dari 44 Peserta PKH terdapat jawaban yang berbeda-beda, dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk memastikan secara langsung bagaimana proses pelaksanaannya di daerah tersebut.

4.2.3 Kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dan Kementerian Sosial telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat (Ketepatan Sasaran)

Untuk menjawab Kriteria miskin yang telah ditentukan oleh BPS dan kementerian Sosial, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ini jika dilihat dari bentuk fisik rumah yang ditempatkan sudah banyak yang memadai. Dan peneliti juga melihat dilapangan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga memiliki asset tetap seperti kendaraan bermotor ada yang memiliki 2-3 kendaraan bermotor di rumahnya, dan memakai perhiasan. Yang sudah jelas mereka itu tidak masuk dalam kategori miskin. Harusnya pemerintah melakukan pendataan ulang untuk menyeleksi siapa yang benar-benar layak menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak terjadi suatu penyimpangan.

1. Bantuan PKH Benar-benar telah ditujukan kepada RTSM dan sesuai dengan Kriteria peserta penerima bantuan PKH

Gambar 4.13



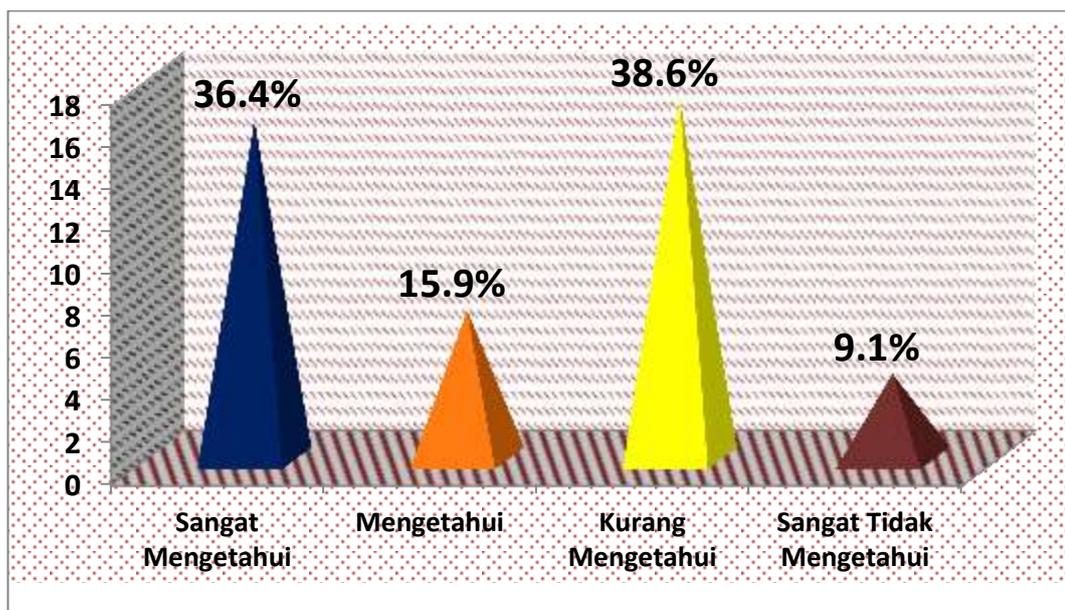
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh kesimpulan Terdapat 1 orang peserta PKH (2.3%) menyatakan sangat sesuai bahwa PKH benar telah ditujukan kepada RTSM dan telah sesuai memenuhinkriteria sebagai Penerima PKH, dan ada juga mengatakan sesuai terdiri dari 26 orang peserta PKH (59.1%) dan yang menyatakan Kurang Sesuai ada sebanyak 14 orang Peserta PKH (31.8%) dan ada juga yang tidak menyatakan Sangat Tidak Sesuai terdiri dari 3 Orang peserta PKH (6.8%). Jadi peserta PKH yang ada di Kecamatan Tanjung Pura benar-benar ditujukan Kepada RTSM. Yang menyatakan tidak sesuai karena ada peserta PKH dilihat dari bentuk bangunan rumah yang ditempati nya dianggap bagus, serta dari segi makanan untuk sehari-hari dianggap mewah, sehingga mereka memberikan pendapat bahwa ada yang tidak berhak mendapatkan PKH tetapi dia tercantum sebagai penerima PKH.

2. Deskripsi Pengetahuan Peserta Terhadap Ada Peserta PKH yang Sebenarnya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Bantuan PKH Namun Terdaftar sebagai Peserta PKH.

Gambar 4.14

Pengetahuan Responden Terhadap Ada Peserta PKH yang Sebenarnya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Bantuan PKH



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan data yang disajikan pada diagram 4.14 dapat kita ketahui bahwa sebanyak 16 orang (36.4%) mengatakan bahwa semua peserta PKH yang mereka kenal dan sangat mengetahui adalah orang yang layak untuk terdaftar sebagai peserta PKH. Selanjutnya sebanyak 7 orang Peserta PKH (15.9%) mengaku mengetahui apakah ada diantara peserta dinilai kurang layak untuk terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Mereka mengaku bahwa rata-rata dari mereka memiliki pendapatan yang sangat rendah sehingga jika tidak mendapatkan

bantuan dari pemerintah, kondisi mereka bisa jadi akan semakin memburuk. Sebagai contoh dengan adanya bantuan dibidang pendidikan telah mengurangi beban pengeluaran mereka. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya pendidikan dapat digunakan untuk membiayai keperluan lain, bisa juga digunakan sebagai modal untuk membuka usaha kecil-kecilan. Hal ini sangat membantu mereka untuk bisa menaikkan pendapatan mereka.

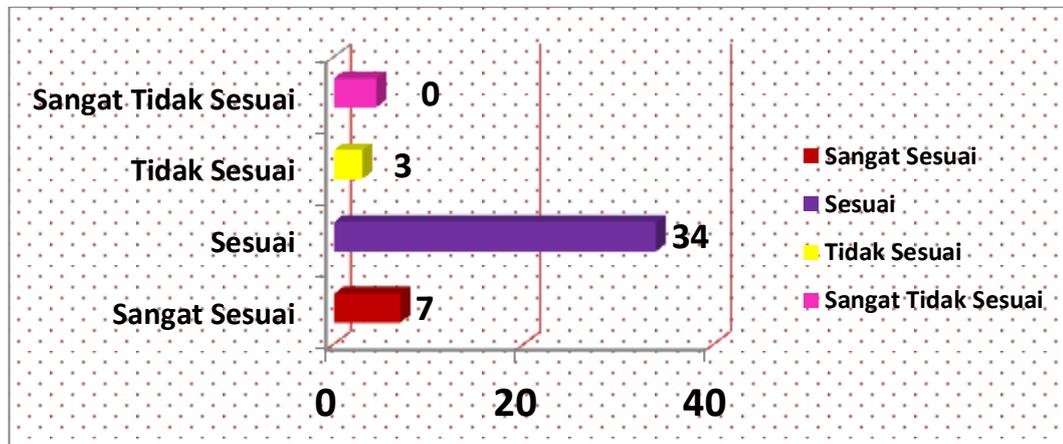
Selanjutnya sebanyak 17 orang Peserta PKH (38.6%) mengaku mengetahui apakah ada diantara peserta dinilai kurang layak untuk terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Mereka memberi alasan karena tidak terlalu mengetahui seluk beluk keluarga peserta lain, jarak rumah yang berjauhan mengakibatkan mereka kurang intens dalam berkomunikasi sehingga membuat mereka kurang mengenal antara yang satu dengan yang lain.

Sebanyak 4 orang Peserta PKH (9.1%) mengatakan bahwa iya menilai ada peserta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan tetapi tetap terdaftar sebagai peserta yang aktif dalam menerima bantuan PKH. Untuk itu iya memberikan pendapat perlu diadakan evaluasi dan merekrut ulang peserta PKH yang baru. Dia berharap agar proses pendataan RTSM dilakukan dengan benar, sehingga bantuan dapat diberikan kepada orang-orang yang tepat pula.

4. Deskripsi Berdasarkan Pemberian Dana Bantuan Sesuai dengan Yang Diharapkan Peserta PKH

Gambar 4.15

Pemberian Dana Bantuan Sesuai dengan Yang Diharapkan Peserta PKH



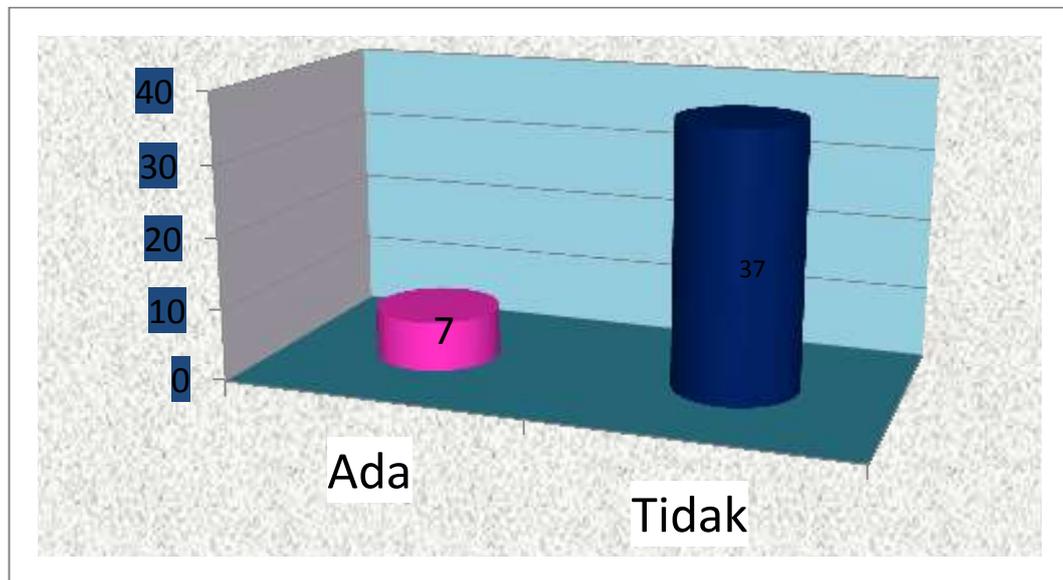
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Dari 44 Responden yang menjadi Penerima PKH terdapat diantara mereka yang menyatakan Sangat Sesuai Dana Bantuan yang diperoleh Peserta PKH telah sesuai dengan yang diharapkan ada sekitar 7 Orang Peserta PKH (15.9%) dan yang menyatakan Sesuai ada Sebanyak 34 Orang Peserta PKH (77.3%) selanjutnya yang paling rendah menyatakan Tidak Sesuai sekitar 3 Orang Peserta PKH (6.8%). Jadi menurut mereka sebagai penerima Bantuan Pemerintah Tersebut merasa bahwa Dana Pendidikan maupun yang lainnya telah sesuai seperti yang mereka harapkan dan pembagiannya disesuaikan dengan masing-masing golongan penerima bantuan.

4. Deskripsi Berdasarkan Kendala yang Terjadi Proses Pencairan Dana

Gambar 4.16

Kendala yang Mungkin Terjadi Proses Pencairan Dana



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Kendala yang paling sering dihadapi oleh pelaksana yaitu keterlambatan informasi dari pusat yang di dapat oleh pendamping sehingga jadwal pembagiandana bantuan pun terlambat atau lebih dari 3 bulan sesuai dengan ketentuan daripemerintah. Adapun yang menyatakan Ada Kendala Proses Pencairan Dana Bantuan PKH ada sekitar 7 Orang Peserta PKH (15.9%) dibandingkan dengan yang menyatakan Tidak Ada yang paling banyak yaitu 37 Orang Peserta PKH (84.1%).

Ketidaktepatan waktu pencairan dana PKH berasal dari pusat sehingga berimbas ke daerah-daerah. Namun walaupun bantuannya terlambat, tetapi selisih waktunya hanya sedikit, misalnya terlambat beberapa hari saja. Pembayaran

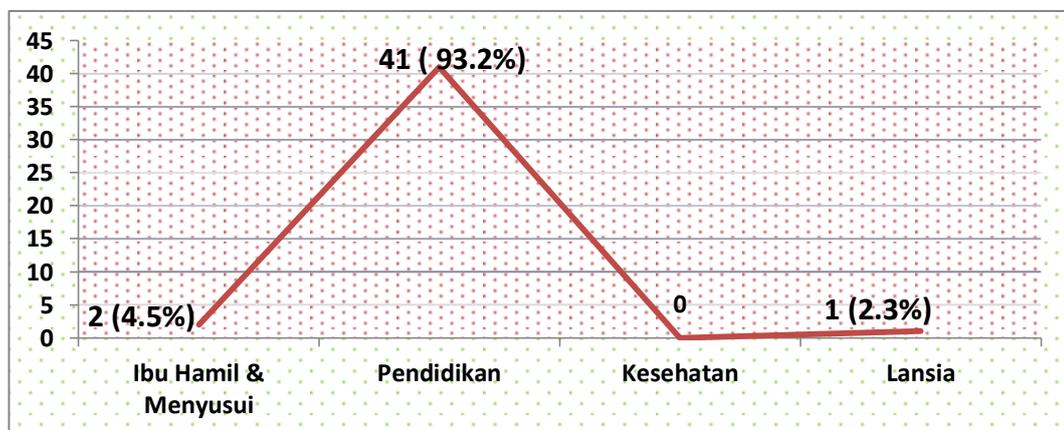
bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan.

5. Apakah PKH yang diperoleh peserta PKH Perkapita/KK?

Dari hasil Penelitian Langsung di Lapangan daerah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dari semua Peserta yang menjadi objek penelitian menyatakan bahwa mereka menerima Bantuan Sosial PKH Perkapita/Orang, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka menerima dana dengan jumlah yang berbeda, baik itu yang memiliki anak yang sekolah dengan tingkat SMA,SMP,SD serta yang memiliki anak balita dan Ibu hami juga mendapatkan Jumlah dana yang berbeda untuk kebutuhan pendidikan anak mereka dan kesehatan mereka yang diterima mereka setiap 3 Bulan sekali.

6. Jenis PKH apa yang Ibu dapatkan

Gambar 4.17



Sumber :Diolah Oleh Penulis

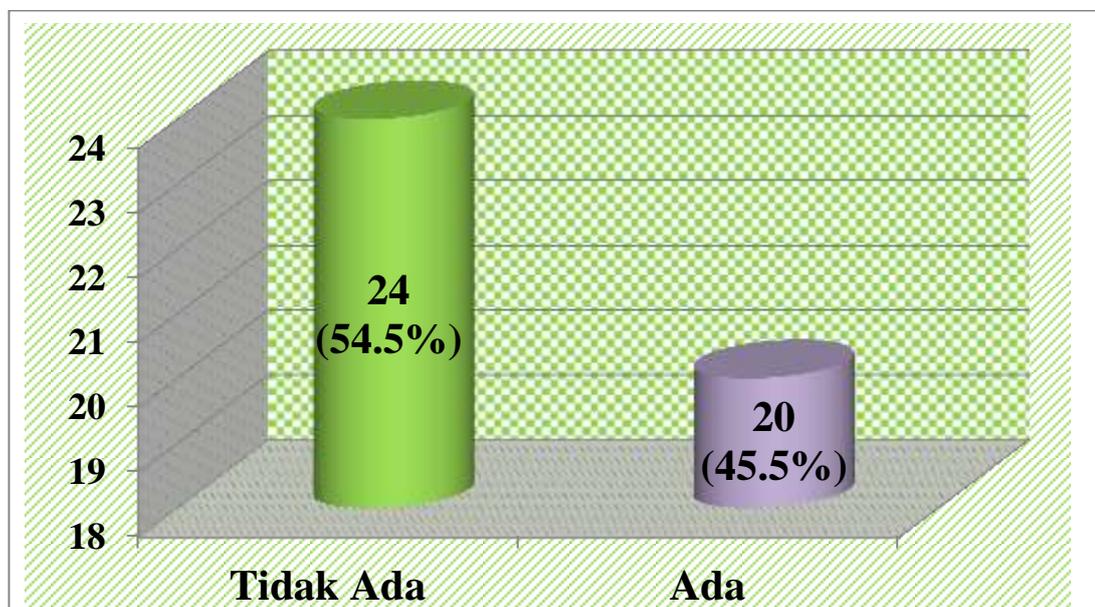
Berdasarkan hasil penelitian pada gambar4.16 dapat kita ketahui bahwa sebanyak 2 orang (4.5%) mengatakan bahwa mereka mendapatkan jenis PKH

bagian Ibu hamil dan Menyusui serta memiliki Anak Balita, sedangkan yang mendapatkan Jenis PKH untuk Pendidikan yaitu sekitar 41 Orang (93.2%) jenis PKH Pendidikan anak sekolah yang paling banyak diantara yang lain seperti untuk Lansia sekitar 1 orang (2.3 %). Karena PKH di utamakan Pemerintah Indonesia khususnya untuk pendidikan, dengan adanya PKH ini sangat membantu bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan anaknya supaya anaknya bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas buat bekal dia dimasa yang akan datang.

Di Kecamatan Tanjung Pura ini yang menjadi sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) komponen yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling banyak itu adalah komponen pendidikan, karena usia rata-rata yang menjadi sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak muda dan tidak juga terlalu tua jadi mereka ini rata-rata memiliki anak usia sekolah , itulah sebabnya komponen pendidikan menjadi yang tertinggi.

7. Apakah ada Bantuan Sosial lain selain PKH?

Gambar 4.18



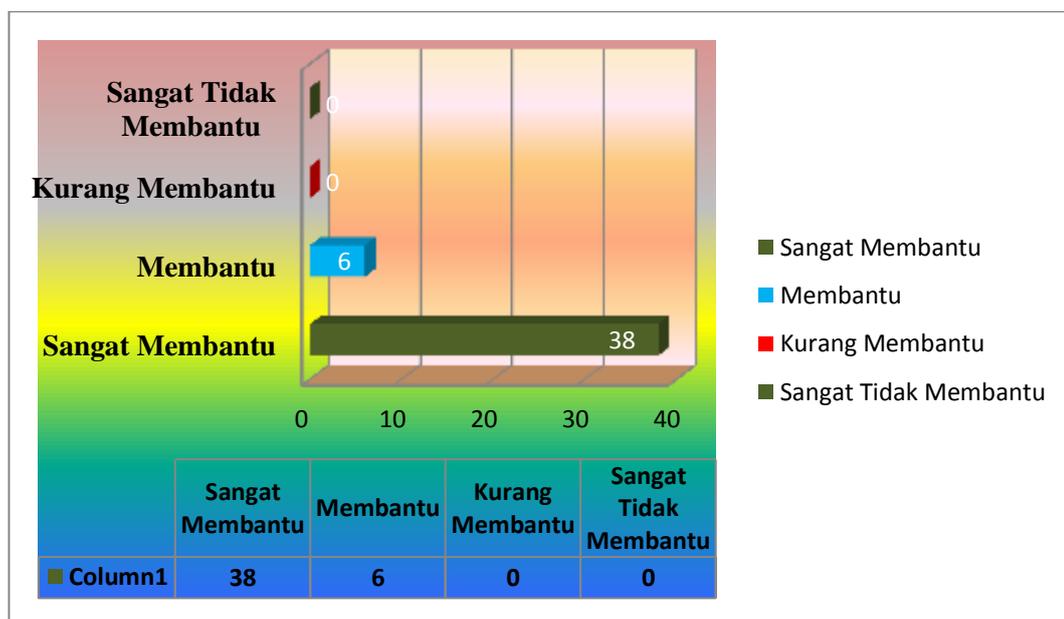
Sumber :Diolah Oleh Penulis

Dari hasil penelitian ini masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura yang menjadi objek penelitian ada 44 Responden. Dimana dari 44 responden yang menyatakan tidak ada bantuan lain selain PKH ada 24 orang (54.5%) sedangkan yang memberikan pernyataan ada bantuan selain PKH yaitu sekitar 20 orang (45.5%) dimana penerima PKH memberikan jawaban bahwa dia mendapatkan bantuan lain selain PKH yaitu seperti KIP, KIS, RASTRA serta lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dengan adanya bantuan itu semua dapat mengurangi pengeluaran mereka seperti biaya Pendidikan dan Kesehatan mereka.

4.2.4 Apakah kebijakan program keluarga harapan (PKH) dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Gambar 4.19

PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari



Sumber :Diolah Oleh Penulis

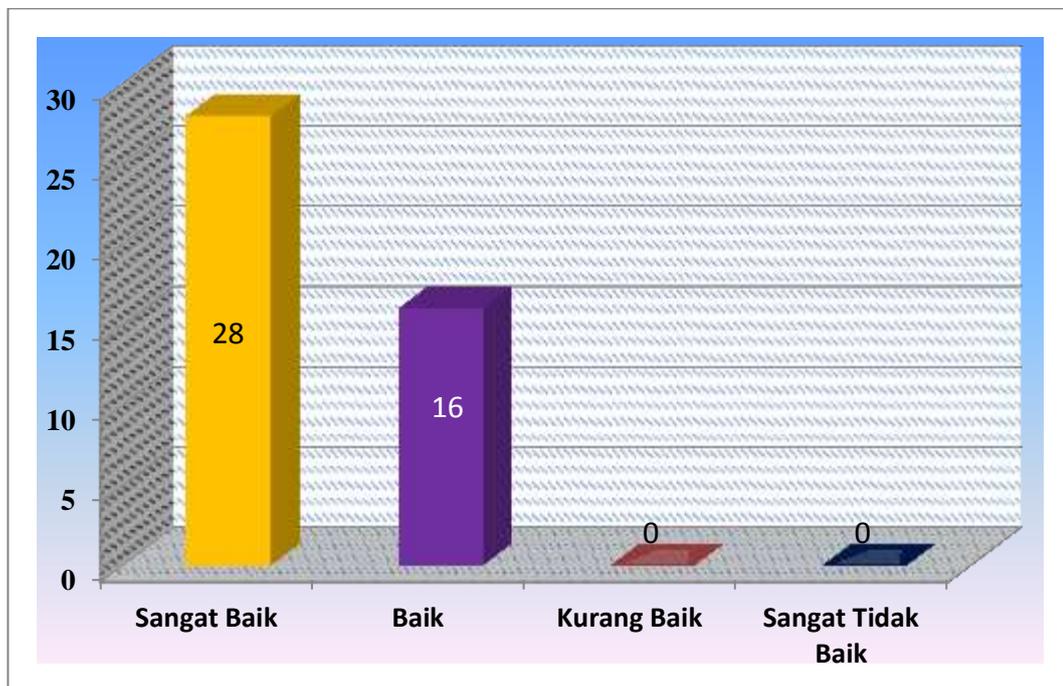
Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis mendapat informasi bahwa sebanyak 38 responden (86.4%) mengakui sangat membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka adalah masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah mengakibatkan mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kehadiran PKH telah menjawab harapan mereka yaitu untuk bisa menyekolahkan anak mereka. Sehingga rasa kekhawatiran mereka mulai sedikit berkurang.

Selanjutnya sebanyak 6 responden (13.6%) mengaku bahwa PKH saat ini membantu dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Selain bantuan dalam bidang pendidikan, mereka juga membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan, tetapi itulah yang tidak mereka dapatkan. Saat pertama kali PKH di sosialisasikan memang dikatakan bahwa kartu PKH juga bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit secara gratis. Namun sejak diberlakukannya BPJS, maka peserta PKH sudah tidak bisa lagi digunakan untuk berobat ke RS.

Peserta PKH adalah masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Jika suatu saat mereka sakit tetapi mereka tidak punya biaya untuk berobat, apakah yang akan terjadi. Akan timbul masalah baru. Untuk itu sebaiknya pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan terkait tidak bisanya kartu PKH digunakan untuk berobat.

Gambar 4.20

Komentar Ibu mengenai Bansos PKH dari Pemerintah

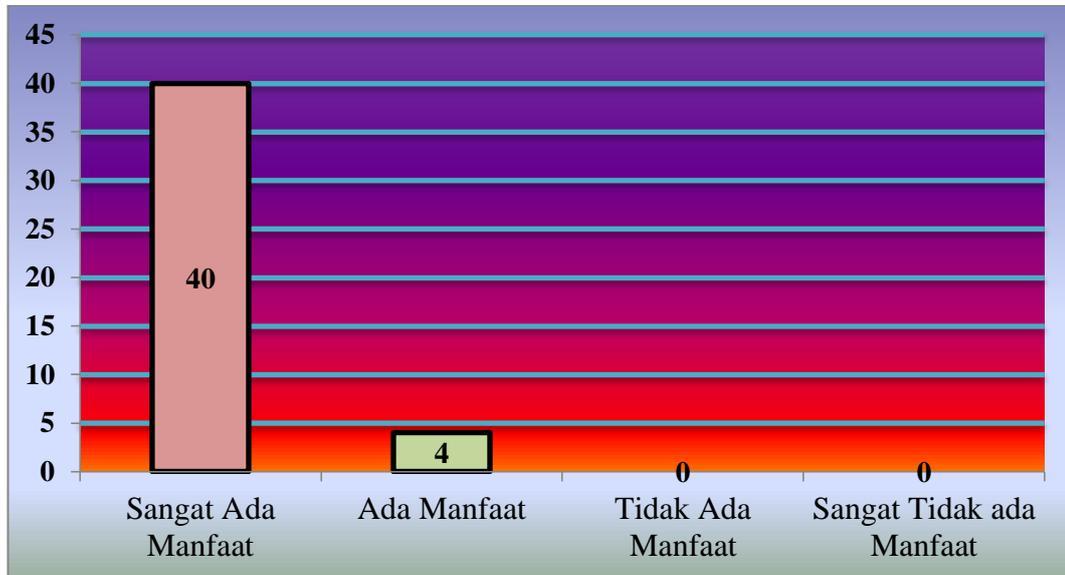


Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa 28 responden (63.6%) mengaku dengan adanya Bansos PKH sangat baik untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk pendidikan anaknya sekolah sehingga mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Sedangkan yang menyatakan Baik ada sekitar 16 Responden (36.4%). Jadi , respon masyarakat sangat mendukung sekali dengan berjalannya program Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Karena dengan adanya Program ini dapat mengurangi pengeluaran mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

Gambar 4.21

Manfaat nyata yang Ibu rasakan setelah mendapatkan Bantuan PKH

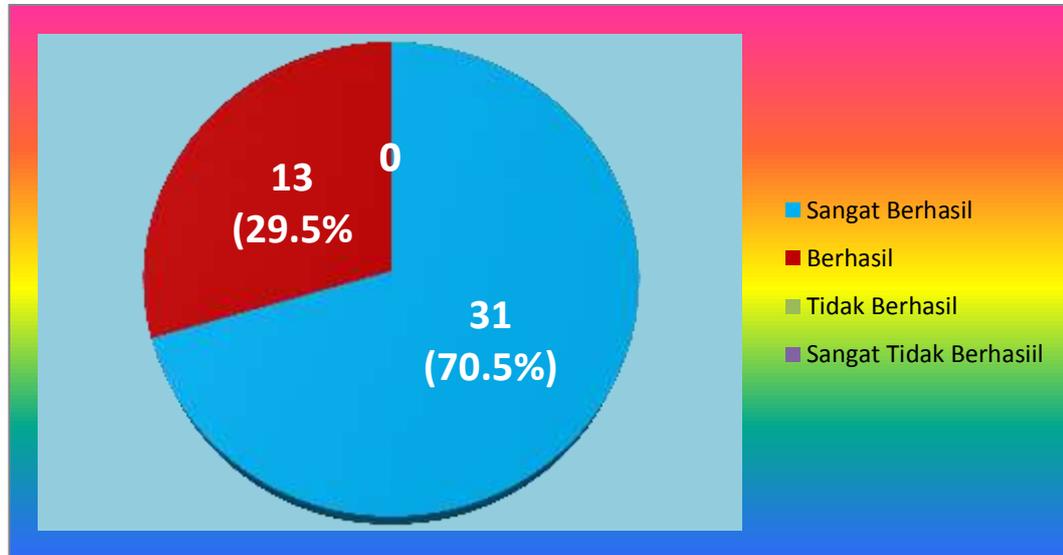


Sumber :Diolah Oleh Penulis

Dari hasil penelitian Langsung dilapangan, masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura yang menjadi objek penelitian ada 44 Responden. Dimana dari 44 responden yang menyatakan Sangat ada manfaat nyata yang dirasakan seteah menerima bantuan PKH tersebut terdiri dari 40 Responden (90.9%), sedangkan yang memberikan jawaban Bermanfaat ada sekita 4 Responden (9.1%). Sedangkan yang memberikan jawaban tidak ada manfaat 0%. Karena mereka merasakan sangat ada manfaat nyata yang mereka rasakan sekarang ini dengan adanya program yang dikeluarkan Pemerintah. Dan program ini benar-benar ditujukan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang membutuhkan.Dengan adanya PKH ini mereka tidak merasa takut dengan pendidikan anaknya. Karena PKH paling diutamakan untuk Pendidikan dan Kesehatan.

Gambar 4.22

Partisipasi Sosial Masyarakat terhadap Kesehatan dan Pendidikan Sudah Berhasil

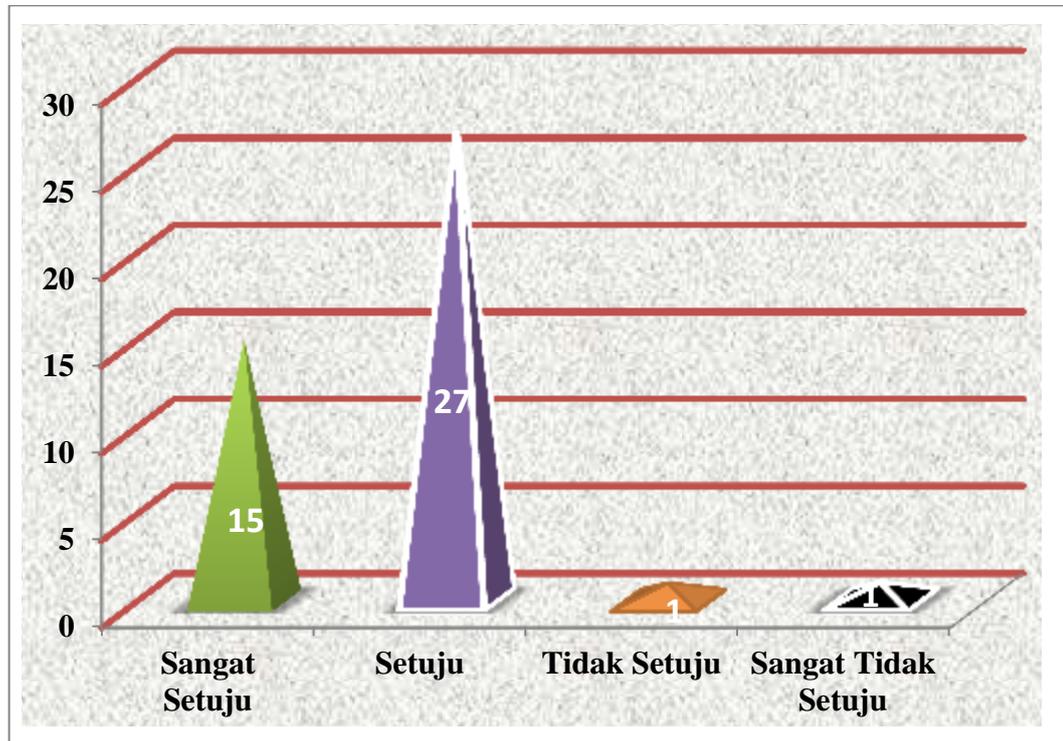


Sumber :Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa mereka memberikan jawaban Pelaksanaan PKH dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan dengan jawaban Sangat Berhasil terdiri dari 31 Responden (70.5%) dan memberikan jawaban Berhasil terdiri dari 13 Responden (29.5%). Jadi dapat dianalisis bahwa PKH terhadap Kesehatan dan Pendidikan di daerah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat benar-benar sudah sangat berhasil didaerah tersebut. Karena dana yang diberikan pemerintah kepada mereka benar-benar digunakan untuk pendidikan dan kesehatan keluarganya. Dan kebijakan pemerintah ini benar-benar sangat membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

Gambar 4.23

PKH membantu mengurangi beban Pengeluaran



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Dari hasil Penelitian Langsung di Lapangan daerah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dari 44 Peserta PKH yang menjadi objek penelitian menyatakan bahwa mereka terdapat 15 Orang (34.1%) yang memberikan jawaban Sangat Setuju PKH membantu dalam mengurangi beban Pengeluaran Peserta PKH dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan. Sedangkan yang memberikan jawaban setuju terdiri dari 27 orang (61.4%) dan jawaban Tidak setuju ada 1 orang (2.3%) dan ada juga yang memberikan jawaban Sangat tidak setuju ada 1 Orang (2.3%) .

Gambar 4.24

Pemberian Dana Bantuan PKH digunakan Untuk Kebutuhan Hidup Peserta

PKH



Sumber :Diolah Oleh Penulis

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan, penulis mendapat informasi bahwa sebanyak 18 responden (40.9%) yang memberika jawaban Sangat Setuju Bahwa dengan adanya PKH dapat memebuhi kebutuhan mereka terutama dalam bidang pendidikan, dan ada juga yang memberikan jawaban Setuju terdiri dari 20 Orang (45.5%) yang memberikan jawaban Tidak setuju ada 5 orang (11.4%) sedangkan yang memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju terdiri dari 4 Orang (2.3%).

4.2.5 Pembahasan dari hasil jawaban Peserta PKH berdasarkan Rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan.

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Dari hasil jawaban kuisisioner diatas, dapat diambil suatu pengamatan bahwa dari ketiga Rumusan masalah yang menjadi permasalahan skripsi penulis, jawaban peserta yang menjadi objek suatu penelitian sangat menentukan apakah proses pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) dapat berjalan secara lancar atau efektif yang terdapat didaerah tersebut. Karena yang terjadi dilapangan bahwa proses pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Karena memberikan pernyataan bahwa Pendamping sangat rutin mengadakan perkumpulan kelompok untuk mengetahui apakah Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Dan pendamping juga memastikan apakah peserta PKH sudah melakukan Kewajibannya sebagai penerima Bantuan yaitu memantau perkembangan pendidikan anaknya apakah anaknya benar-benar mengikuti pelajaran disekolah atau tidak.

Karena Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan Pemerintah Ini tujuannya untuk meningkatkan Partisipasi anak sekolah sehingga mendapatkan pendidikan yang layak dan sangat bermanfaat untuk mereka kedepannya. Dengan mendapatkan pendidikan yang tinggi mereka dapat bersaing dalam dunia kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang mungkin terjadi. Dan dengan dana yang mereka terima sesuai dengan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Sehingga dapat digunakannya untuk kebutuhan sekolah dan dapat menambah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan pelaksanaan proses pencairan dana yang diterima tepat waktu tetapi ada juga keterlambatan yang tidak disengaja. Misalnya, ketidaktepatan waktu pencairan dana PKH berasal dari pusat sehingga berimbas ke daerah-daerah. Namun selisih waktunya hanya sedikit, misalnya terlambat beberapa hari saja.

2. Kriteria Kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dan Kementerian Sosial telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Dari rumusan masalah kedua yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini antara lain apakah kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh BPS dan Kementerian Sosial telah memenuhi persyaratan sebagai penerima PKH di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Dari informasi yang didapatkan penulis dan hasil penyebaran kuisioner langsung ke lapangan. Penulis mengamati bahwa ada peserta PKH tidak layak mendapatkan bantuan tersebut karena dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan dapat juga dilihat dari luas bangunan rumahnya, lantai rumahnya, dinding tempat tinggalnya, makanan sehari-hari, cara berpakaian serta dari kendaraan yang dimiliki dan asset lainnya dianggap mewah dan tidak layak menjadi penerima bantuan PKH. Sedangkan yang berhak menerima bantuan adalah untuk RTSM yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Tetapi mereka merasa bahwa mereka berhak mendapatkannya. Sedangkan yang saya lihat dilapangan masih banyak seharusnya yang berhak mendapatkan bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkannya.

Seharusnya Pemerintah setempat atau Dinas Sosial melakukan Pendataan ulang untuk menyeleksi siapa yang benar-benar layak menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak terjadi suatu penyimpangan. Dan permasalahan ini harus benar-benar diperhatikan sekali siapa yang berhak menerima bantuan tersebut dan siapa yang tidak berhak menerima bantuan tersebut. Sedangkan masih ada yang lebih membutuhkan daripada dia yang sudah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anaknya serta kesehatan keluarganya.

3. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengurangi tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Sedangkan dari Rumusan Masalah ketiga menjadi pokok permasalahan antara lain apakah kebijakan Proram Keluarga Harapan (PKH) dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Yang terjadi dilapangan saat ini, bahwa dari 44 Responden memberikan pernyataan bahwa dengan adanya Bantuan dari Pemerintah ini dapat membantu untuk biaya pengeluaran selama 1 bulan dalam 1 kepala/orang.

Dimana penghasilan yang diperoleh dalam 1 Keluarga Rata-rata berpenghasilan Rp. 1.500.000 /Bulan. Sedangkan dalam 3 bulan sekali mereka mendapatkan bantuan PKH untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Misalnya mereka memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak mendapatkan dana yang berbeda yaitu untuk tingkat SD sebesar 450.000/3 bulan sekali= 150.000/bulan untuk 1 orang. Sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 750.000/3

bulan sekali= 250.000/bulan untuk 1 orang. Sedangkan yang memiliki anak balita sebesar 1.200.000/3 bulan sekali= 400.000/ bulan yang diperoleh untuk 1 orang. Jadi Total dana yang diperoleh peserta PKH dalam 1 bulan adalah 150.000 + 250.000 + 400.000 = 800.000 yang diperoleh dalam 1 Bulan.

Jadi, dari Penghasilan/ Bulan Peserta PKH ditambah dengan dana PKH yang diperoleh peserta PKH/Bulan adalah 1.500.000 + 800.000 = 2.300.000/ Bulan yang diperoleh mereka. Sedangkan dari 44 Peserta PKH terdiri dari 208 orang dari 44 KK. Jadi rata-rata jumlah anggota keluarga dalam 1 KK terdiri dari 208 orang/44 Responden= 5 orang rata-rata dalam 1 Keluarga. Jadi pengeluaran / Bulan yang harus dikeluarkan dalam 1 orang adalah sebesar 2.300.000/5 = 460.000/bulan dalam 1 orang.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standard kemiskinan antara lain :

1. Tidak Miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran / bulan >350.610
2. Hampir tidak miskin, pengeluaran / bulan per orang antara 280.488 – 350.610.
3. Hampir Miskin, Pengeluaran / bulan per orang 233.740 – 280.488.
4. Miskin, pengeluaran per orang per bulan < 233.740.
5. Sangat Miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Jadi, dari hasil diatas rata-rata pengeluaran 1 orang/ bulan adalah sebesar 460.000/bulan. sedangkan dikatakan miskin apabila pengeluaran per orang per

bulan adalah < 233.740. Sedangkan yang terjadi dilapangan saat ini pengeluaran mereka 460.000/bulan. Berarti tidak termasuk dalam kategori miskin. Dengan adanya PKH sangat membantu mereka untuk biaya pendidikan, dan bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka seperti makan dan keperluan lainnya..

Dan mereka juga memberikan pernyataan bahwa mereka berharap Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus dijalankan. Karena dengan adanya program ini sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan dengan biaya pendidikan yang mahal dan kesehatan yang mahal serta bahan pokok makanan yang mahal, mereka menganggap PKH adalah Program yang benar-benar sangat tepat untuk mengurangi biaya pengeluaran mereka dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut.

Tidak dapat dikategorikan miskin karena peserta PKH mengatakan bahwa pengeluaran mereka/ diatas dari ketentuan yang dikeluarkan BPS yaitu sebesar 460.000/bulan untuk satu orang. Berarti peserta PKH tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Miskin, karena dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti untuk biaya Makanan, kesehatan, pendidikan serta biaya yang tidak terduga yang mungkin ada dalam satu bulan seperti biaya uang listrik, air dan lainnya yang harus dipenuhi oleh mereka setiap bulannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan lancar, karena dari sebagian peserta PKH memberikan pendapat bahwa mereka mengetahui maksud tujuan dari PKH dan mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PKH, serta mereka memberikan jawaban bahwa pendamping sangat rutin mengadakan perkumpulan kelompok untuk mengadakan sosialisasi kepada peserta penerima PKH.
2. Dalam prosesnya terdapat pula kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dana bantuan dan verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data mengenai ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak efektif.
3. Berdasarkan hasil analisis data mengenai ketepatan sasaran bahwa PKH ditujukan kepada RTSM yang telah ditetapkan oleh BPS dan Kementerian Sosial dapat disimpulkan bahwa hasilnya kurang efektif, dan ada juga yang memberikan pendapat bahwa ada penerima PKH yang dianggap tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan dianggap tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan. Yang dapat dilihat dari segi fisik rumah, luas bangunan rumahnya, makanan sehari-hari, jumlah kendaraan yang dimiliki, serta dari pakaian yang dianggap mewah, dan asset tetap lainnya yang menyebabkan tidak efektifnya penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

4. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Karena dengan adanya program tersebut dapat mengurangi biaya pengeluaran mereka sehari-hari. Seperti biaya makan, serta biaya pendidikan anak dan kesehatan mereka. Dengan adanya dana yang diberikan kepada mereka benar-benar sangat dimanfaatkan sekali oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Program Keluarga Harapan (PKH) baru mampu meningkatkan partisipasi pendidikan, partisipasi pendidikan dan kesehatan inilah yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

5.2 SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap dapat di pertimbangkan sebagai bahan masukan diantaranya yaitu :

1. Bagi pihak pelaksana dalam hal pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan program tersebut seperti melakukan aktivitas pendamping dalam menyalurkan dana bantuan PKH kepada RTSM yang memenuhi persyaratan hanya saja perlu diperhatikan kembali mengenai jangka waktu yang terkadang tidak sesuai dari jadwal yang sudah ditentukan.

2. Disarankan kepada masyarakat penerima manfaat untuk bisa berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program keluarga harapan dengan ikut aktif dalam pertemuan kelompok yang telah disepakati bersama.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan justru menjadikan peserta malas berusaha (hanya mengandalkan dana bantuan). Oleh sebab itu, sebaiknya Program Keluarga Harapan (PKH) berdampingan dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga peserta yang sebagian besar perempuan memiliki keterampilan sebagai sumber pemasukan untuk membantu perekonomian keluarga.
4. Pemerintah harus meninjau ulang ketepatan sasaran rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, karena masih ada sebagian penerima yang hidup bekecukupan mendapatkan bantuan tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya pemutakhiran data untuk calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sebaiknya dalam pemilihan pesertanya harus menggunakan data-data baru artinya adalah di survei dan lihat kembali dengan benar-benar apakah peserta berhak menerima atau tidak yang disesuaikan dengan kriteria kemiskinan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Bandung: Alfabeta.

Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*

BPS Langkat 2014 *kabupaten langkat dalam angka 2014*. Kabupaten Langkat

BPS Langkat 2015 *kabupaten langkat dalam angka 2015*. Kabupaten Langkat

BPS Langkat 2017 *kabupaten langkat dalam angka 2017*. Kabupaten Langkat

BPS. *Jumlah Penduduk Miskin*. (On-Line) tersedia di <http://www.bps.go.id>

Boediono, 1999

Dinas sosial. 2016. 'kriteria untuk menentukn keluarga rumah tangga miskin' www.Dinsos.Jogjaprov.go.id diakses 15 Januari 2018

Florida, Purba Yohanna, 2014. Efektivitas Pelaksanaan Progra Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor.

<https://www.antaraneews.com/berita/605438/mensos-pkh-efektif-turunkankemiskinan-dan-kesenjangan>

<https://bps.go.id/>

<http://blogberita.net/2008/06/05/14syarat-warga-miskin-pnerimabl/1810208/19.25>

Kelurgaharapan.com/indeks-bantuan-PKH-2016/Diakses 15 Januari 2018

Kementerian Sosial RI, 2007. *Pedoman Umum PKH*. Jakarta: UPPKH Pusat.

Kementerian Sosial RI, 2007. *Modul Diklat TOT PKH*. Jakarta: Pusdiklat Kesos.

Kriteria Kemiskinan Warga Miskin Yang Dapat Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Badan Pusat Statistik(BPS)-bps.go.id

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Kuncoro, mudrajat, (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta : Erlangga

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*,

Yogyakarta: YKPN 2002

Laluhang, Sri Masita 2015. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kendahe II
Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe*

Laili, Misfi Rohmi 2014. *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat*

Smith & Todaro, *pembangunan ekonomi*, 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : **Novia Lestari**
NPM : 1505180078
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rawa Gg Karya No.25 Medan
Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudara

II DATA ORANG TUA

Nama Ayah : **Afrizal**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 31 Desember 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rawa Gg Karya No.25 Medan
Nama Ibu : **Nasri Yeni**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 31 Desember 1973
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rawa Gg Karya No.25 Medan

III PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Muhammadiyah 23 Medan Tamat Tahun 2009
2. MTS Al-Ulum Medan (Amaliun) Tamat Tahun 2012
3. SMK Negeri 1 Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai Mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

KUISIONER PENELITIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Dengan kerendahan hati saya mohon kesediaan Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan (angket) yang saya berikan. Data ini diperlukan sebagai tambahan informasi dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul: **“Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ”**

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET :

1. Anda diminta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang ada pada angket ini yang sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan anda, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.
2. Berikanlah tanda checklist (X) pada kolom yang Anda anggap sesuai dengan jawaban pada Anda.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : _____
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : 20-30 30-40 40-50 50-70
4. Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA
5. Pekerjaan : _____

B. Pertanyaan

Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ”

1. Jumlah anggota Keluarga Bapak/Ibu
 - a. 2 orang
 - b. 2 sampai 4 orang
 - c. 5 sampai 7 orang
 - d. lebih dari 7 orang
2. Jumlah anak dalam anggota keluarga Bapak / Ibu
 - a. Tidak ada
 - b. 1 sampai 2 orang
 - c. 3 sampai 5 orang
 - d. lebih dari 5 orang
3. Pendapatan Bapak / Ibu perbulan
 - a. Di bawah Rp 500.000,-
 - b. 2.500.000,-
 - c. Rp 1.750.000,- sampai Rp

11. Apakah proses pencairan dana bantuan PKH tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya ?

- a. Tepat
- b. Tidak Tepat
- c. Kurang Tepat
- d. Sangat Tidak Tepat

12. Apakah pemberian dana bantuan PKH telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat ?

- a. Sangat Sesuai
- b. Sesuai
- c. Tidak Sesuai
- d. Sangat Tidak Sesuai

13. Apakah ada kendala yang terjadi didalam proses pencairan dana PKH ?

- a. Ada
- b. Tidak ada

Alasannya :

14. Apakah Ibu pernah hadir dalam rapat/musyawarah yang dilaksanakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membahas Program yang akan dilaksanakan ?

- a. Pernah
- b. Tidak Pernah
- c. Kadang-kadang

15. Seberapa sering pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kegiatan sosialisasi kepada para peserta PKH ?

- a. Sangat Sering
- b. Tidak Pernah
- c. Kadang-kadang

16. Apakah PKH yang Ibu peroleh Perkapita atau / KK ?

- a. Perkapita/Perkepala
- b. Per KK

Alasannya :

17. Darimana Ibu pertama kali memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan ?

- a. Pejabat desa/ Kecamatan
- b. Tetangga/Teman
- c. Media Cetak
- d. Televisi/Radio

18. Sudah berapa lama Bapak / Ibu mendapatkan bansos PKH tersebut?

- a. 1 tahun
- b. 2 tahun
- c. 3 tahun
- d. Lebih dari 3 tahun

19. Apakah dengan adanya Bantuan PKH yang ditetapkan Pemerintah dapat membantu Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

- a. Sangat Membantu
- b. Tidak Membantu
- c. Kurang Membantu
- d. Sangat Tidak Membantu

Alasannya :

20. Apa komentar Bapak / Ibu mengenai bansos PKH yang telah diberikan oleh pemerintah?

- a. Sangat suka
- b. Suka
- c. Kurang suka
- d. Sangat tidak suka

Alasannya :

21. Apakah ada manfaat nyata yang Ibu rasakan setelah Ibu mendapatkan Bantuan PKH ?

- a. Sangat Bermanfaat
- b. Tidak Bermanfaat
- c. Kurang Bermanfaat
- d. Sangat tidak Bermanfaat

Alasannya :

22. Menurut Ibu apakah tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kesehatan dan Pendidikan sudah berhasil ?

- a. Berhasil
- b. Kurang berhasil
- c. Tidak Berhasil
- d. Sangat Tidak Berhasil

Alasannya : _____

23. PKH membantu dalam mengurangi beban pengeluaran peserta PKH dalam hal pendidikan dan kesehatan ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat tidak Setuju

Alasannya : _____

24. Pemberian dana bantuan PKH benar-benar berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup peserta PKH ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

Alasannya : _____

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : NOVIA LESTARI
NPM : 1505100070
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen~~/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 21-01 2019
Pembuat Pernyataan




NOVIA LESTARI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 66/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/11/2018

Kepada Yth.

Medan, 22/11/2018

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Novia Lestari
NPM : 1505180078
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Efektifitas kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat kemiskinan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : -

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Novia Lestari)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 66/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/11/2018

Nama Mahasiswa : Novia Lestari
NPM : 1505180078
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi :
Tanggal Pengajuan Judul : 22/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 307 / 12 / EP / 18, atau,
Alternatif judul lainnya
..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : ROSWITA HAFNI (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 05 Desember 2018

Dosen Pembimbing

Dra. Roswita Hafni, M.Hi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 9069/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran :
Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN

Medan, 28 Rabiul Awwal 1440 H
06 Desember 2018 M

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Pimpinan / Direksi
DESA PEKUBUAN
Jl.Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program **Studi Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : **NOVIA LESTARI**
Npm : **1505180078**
Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**
Semester : **VII (Tujuh)**
Judul : **Ekektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Dekan

H. JASURI, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

UMSU
Cerdas | Terpercaya

Harap surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 77~~88~~ / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pada Tanggal : 06 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : NOVIA LESTARI
N P M : 1505180078
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Ekeftivitas kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

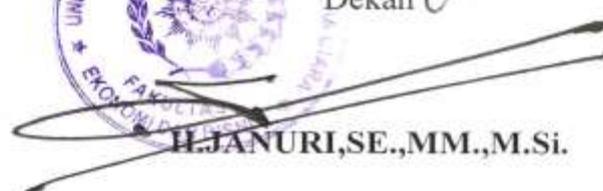
Dosen Pembimbing : Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,M.Si.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkanya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **06 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Rabiul Awwal 1440 H
06 Desember 2018 M


Dekan 
H. JANURI, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.